



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan sebagai salah satu unsur perubahan dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan Pemerintah Kabupaten Magetan yang efektif, tepat ukuran dan fungsi serta akuntabel, perlu adanya peta proses bisnis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 115) ;

15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Koordinasi adalah proses memadukan dan menyerasikan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pelaksanaan adalah proses atau cara melaksanakan atau merealisasikan rencana-rencana kegiatan perangkat daerah yang telah ditetapkan.

8. Evaluasi adalah kegiatan mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, dan menyarankan perbaikan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023; dan
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 4

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan bertujuan:

- a. mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar perangkat daerah sehingga menghasilkan kinerja yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Pemerintahan Kabupaten Magetan serta menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi Pemerintah Kabupaten Magetan dan masyarakat; dan
- b. mewujudkan keselarasan dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan antar perangkat daerah untuk menghasilkan dan mencapai indikator dan target kinerja sehingga dapat dilakukan secara berjenjang mulai dari

Perangkat Daerah sampai dengan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pasal 5

Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan berpedoman pada:

- a. tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Magetan dan Perangkat Daerah;
- b. indikator dan target kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan dan Perangkat Daerah;
- c. Perangkat Daerah yang terkait pencapaian tujuan dan sasaran; dan
- d. mekanisme hubungan kerja antar perangkat daerah dan unit kerja di dalam Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pasal 6

Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan meliputi:

- a. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
- b. Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, disusun berdasarkan hubungan sinergi tugas dan fungsi serta indikator kinerja kelembagaan Perangkat Daerah untuk tujuan mencapai indikator dan target tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (2) Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah masing-masing untuk mencapai indikator dan target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah secara efektif.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan wajib menyusun Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dalam menyusun Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (3) Dokumen Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (5) Bagian Organisasi melaporkan penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Peta Proses Bisnis dapat dilakukan evaluasi untuk menyelaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Magetan dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Magetan lainnya.

Pasal 10

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

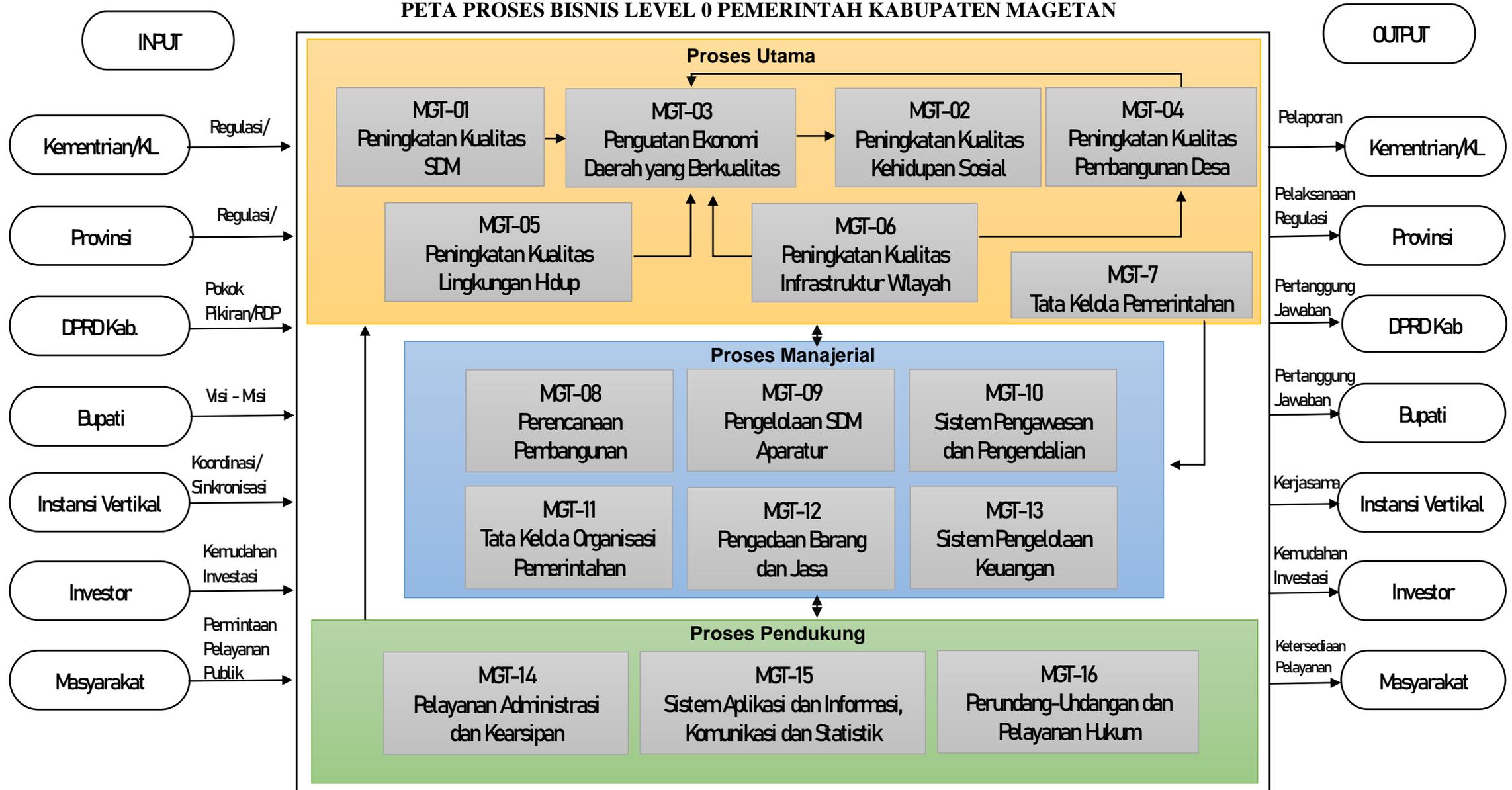
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

A. BAGAN PETA PROSES BISNIS

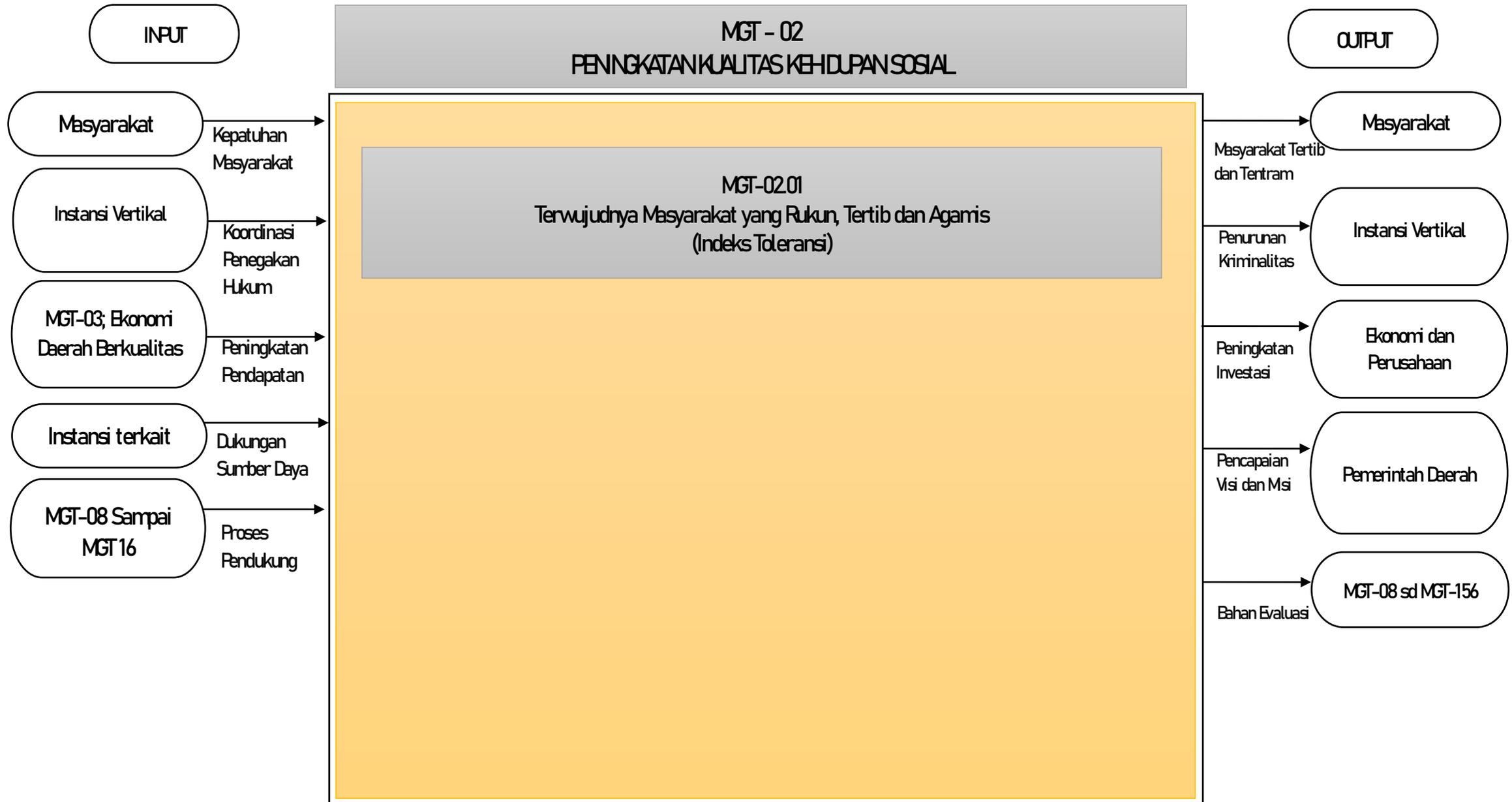
PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



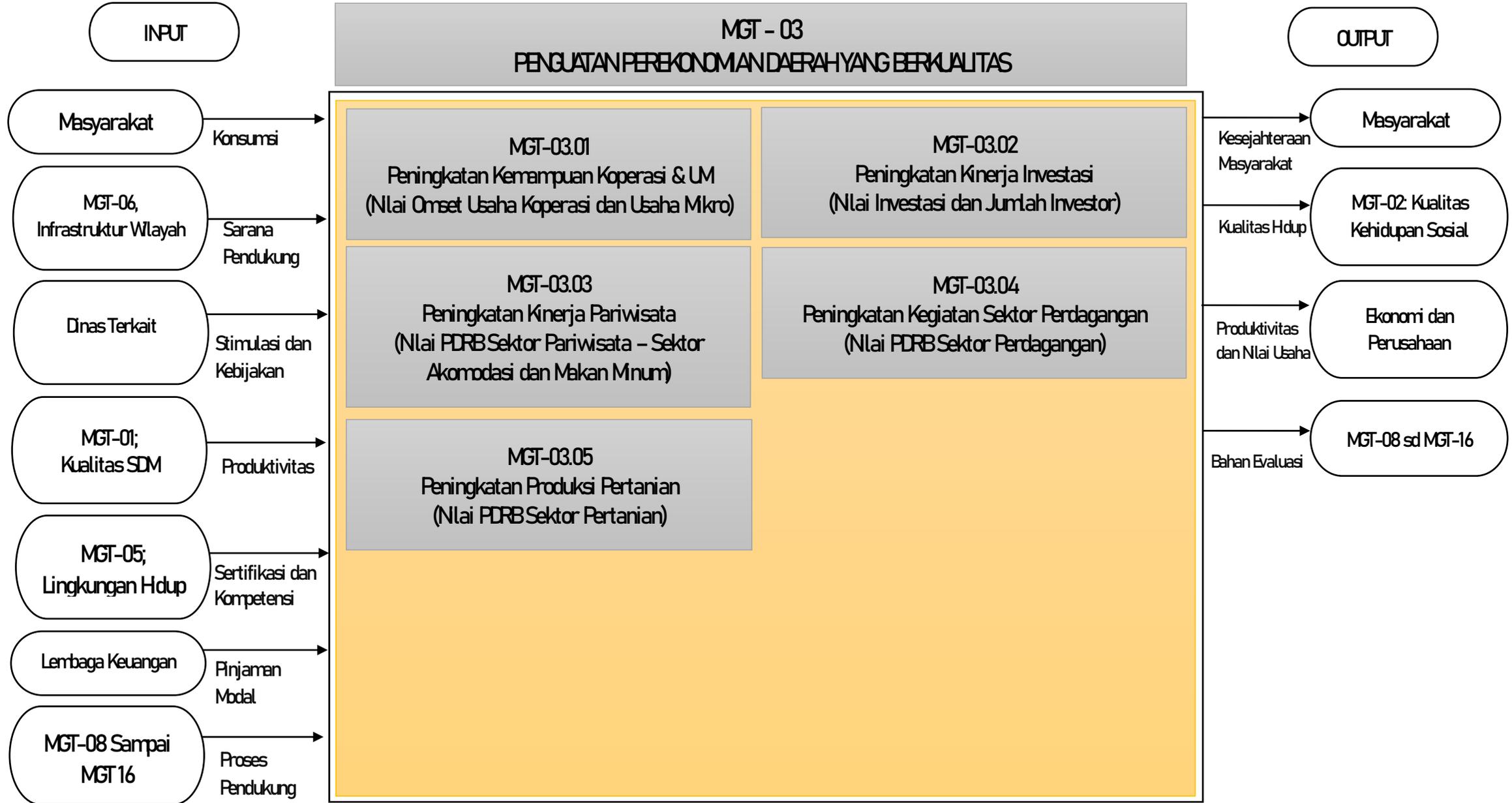
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



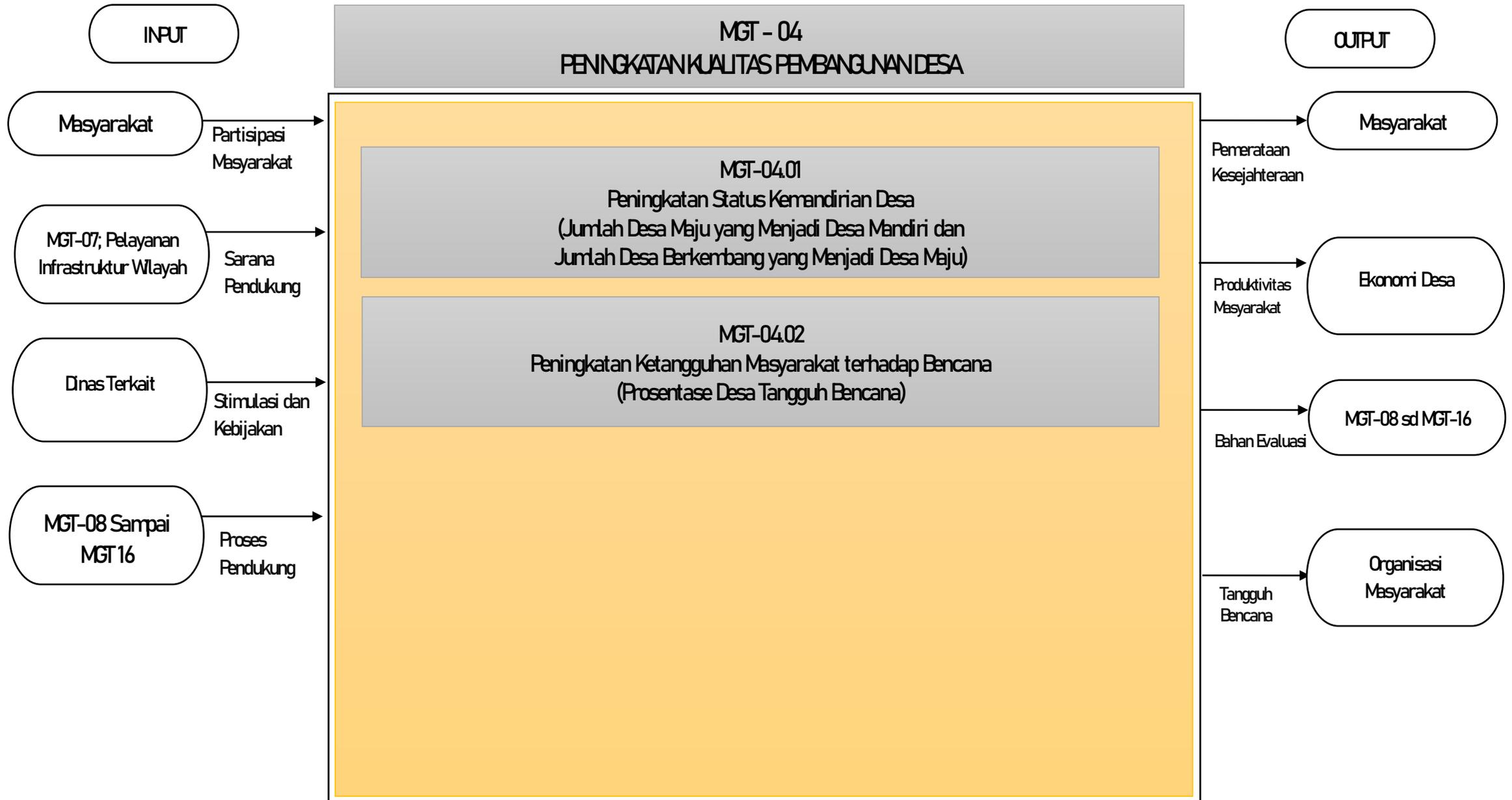
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



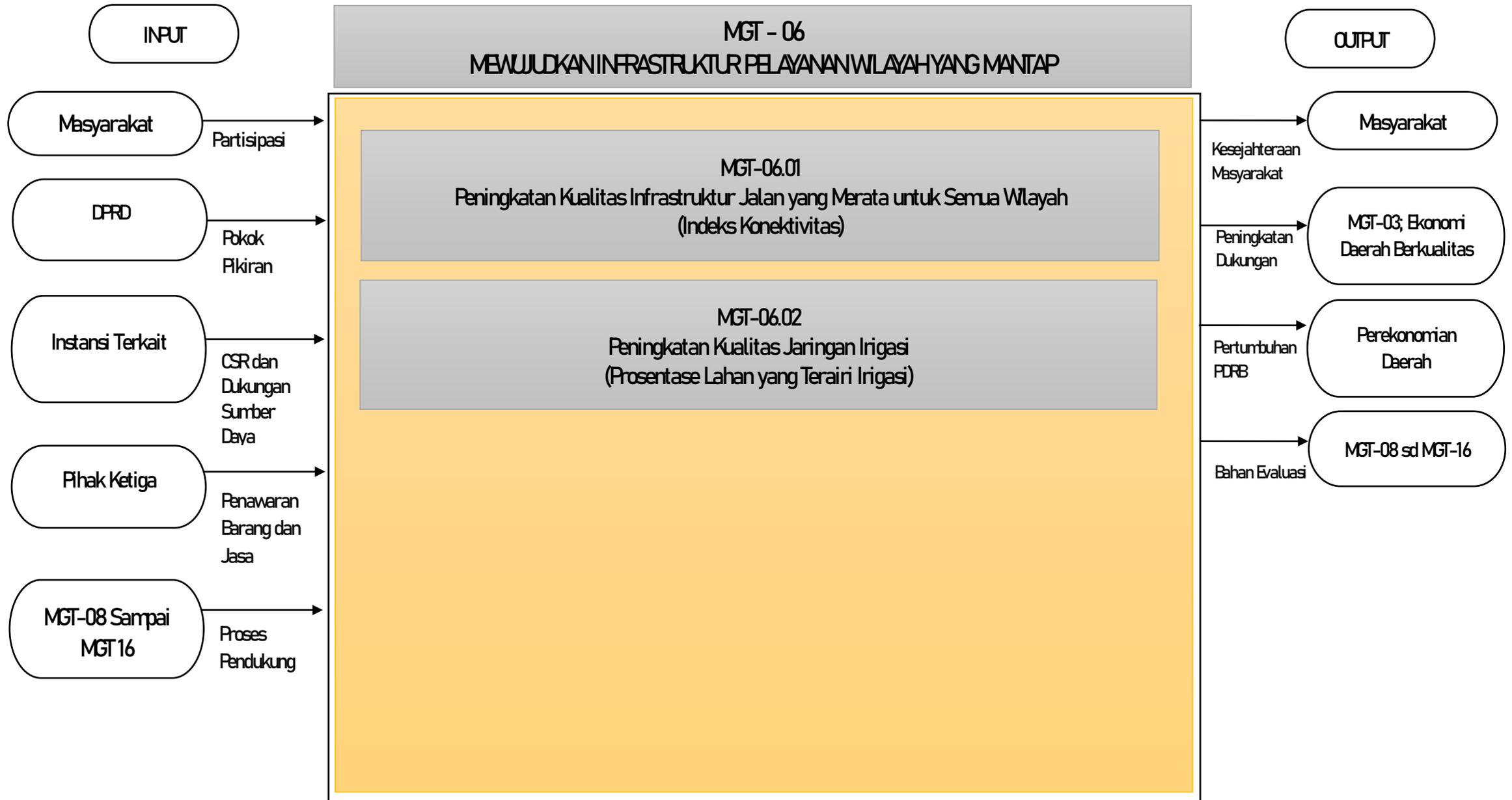
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



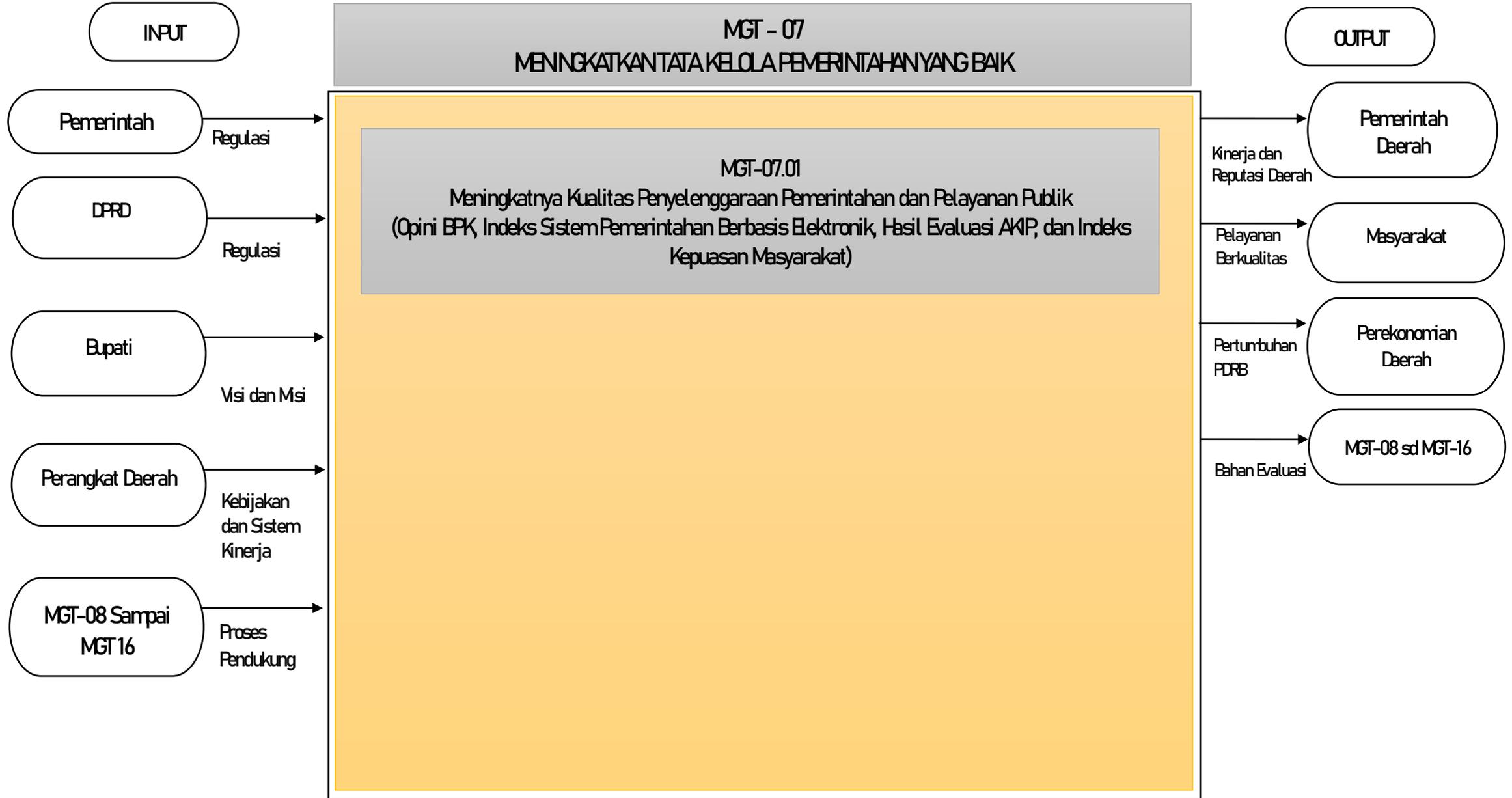
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



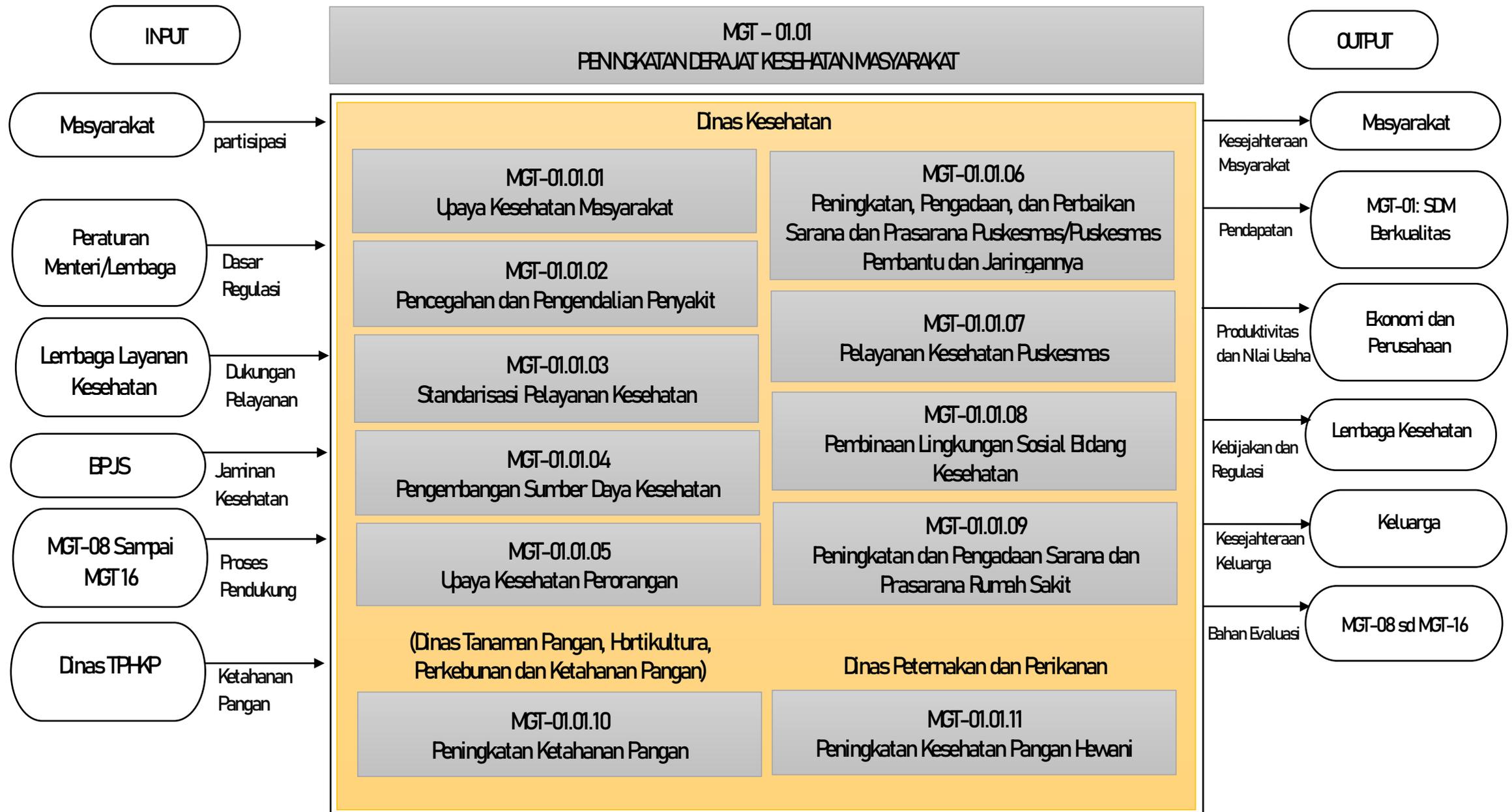
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



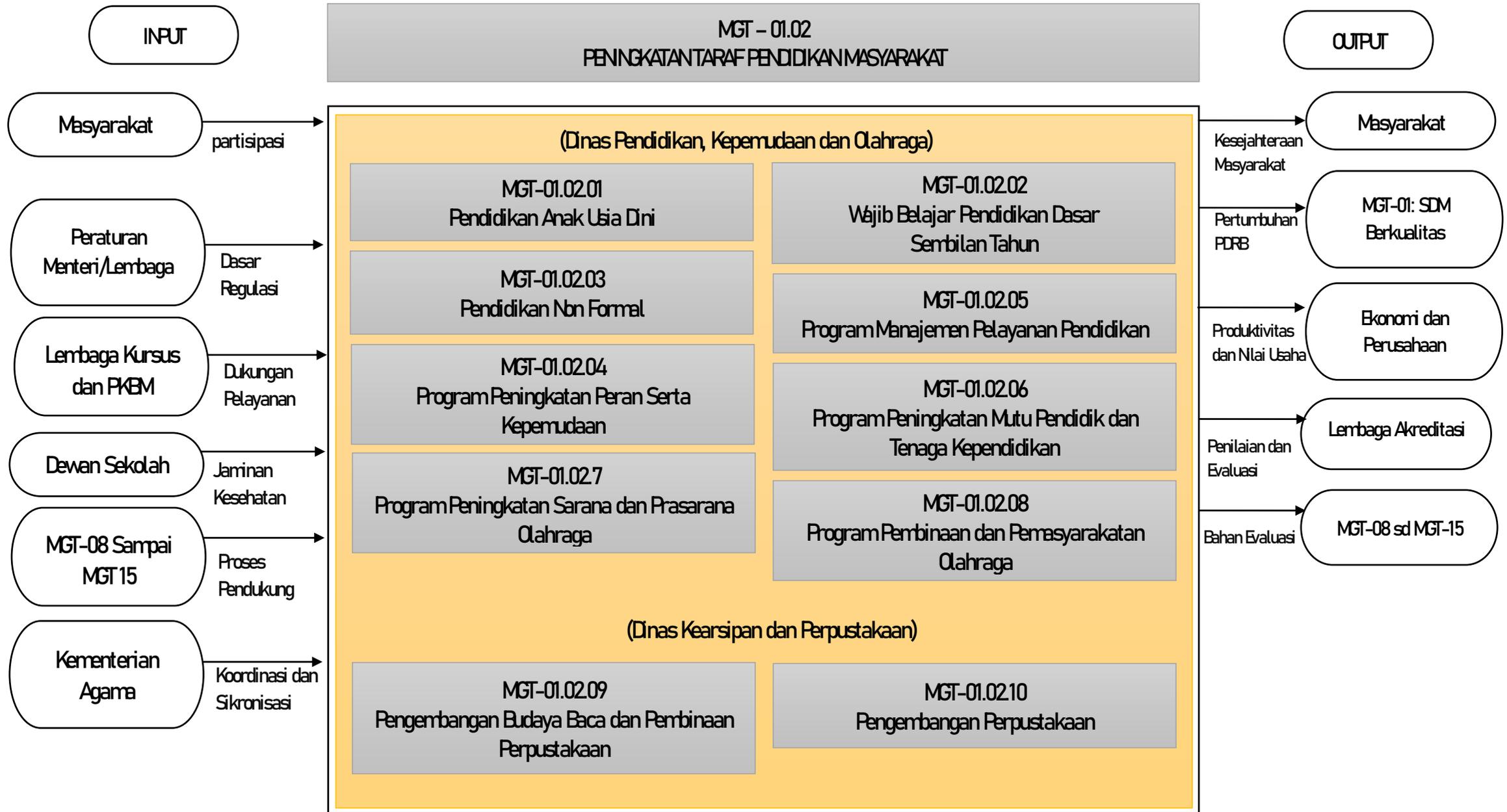
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



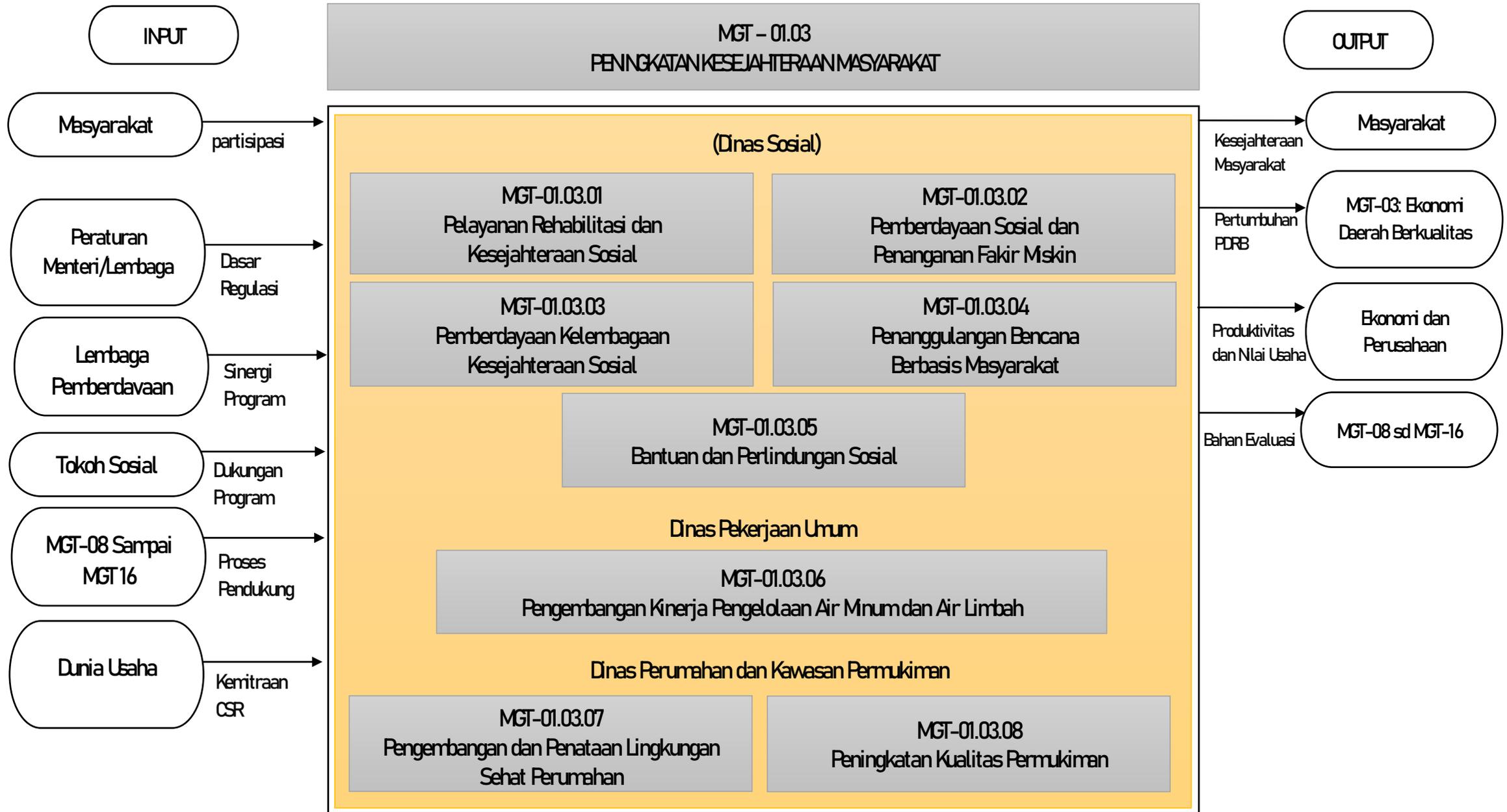
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



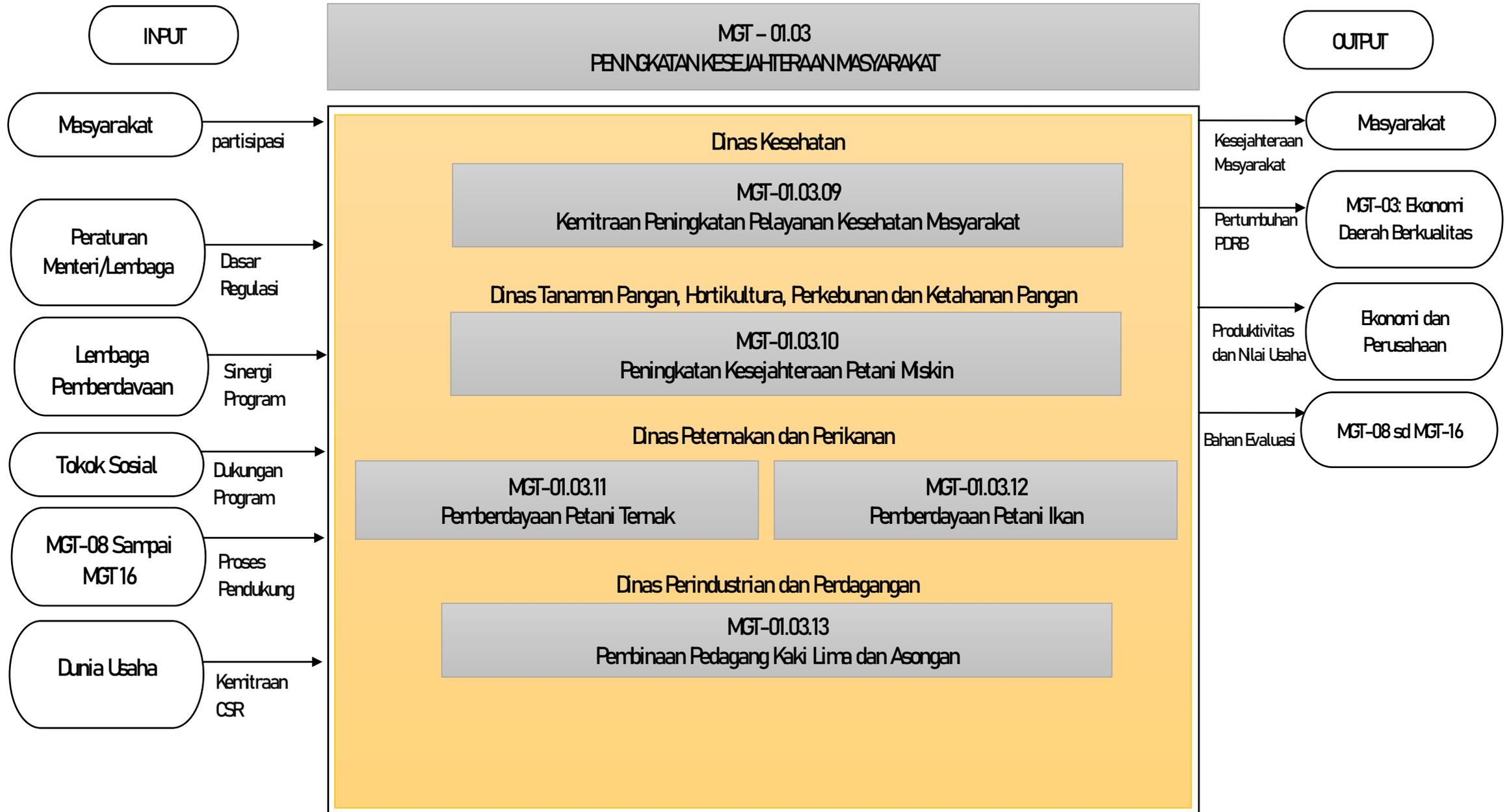
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



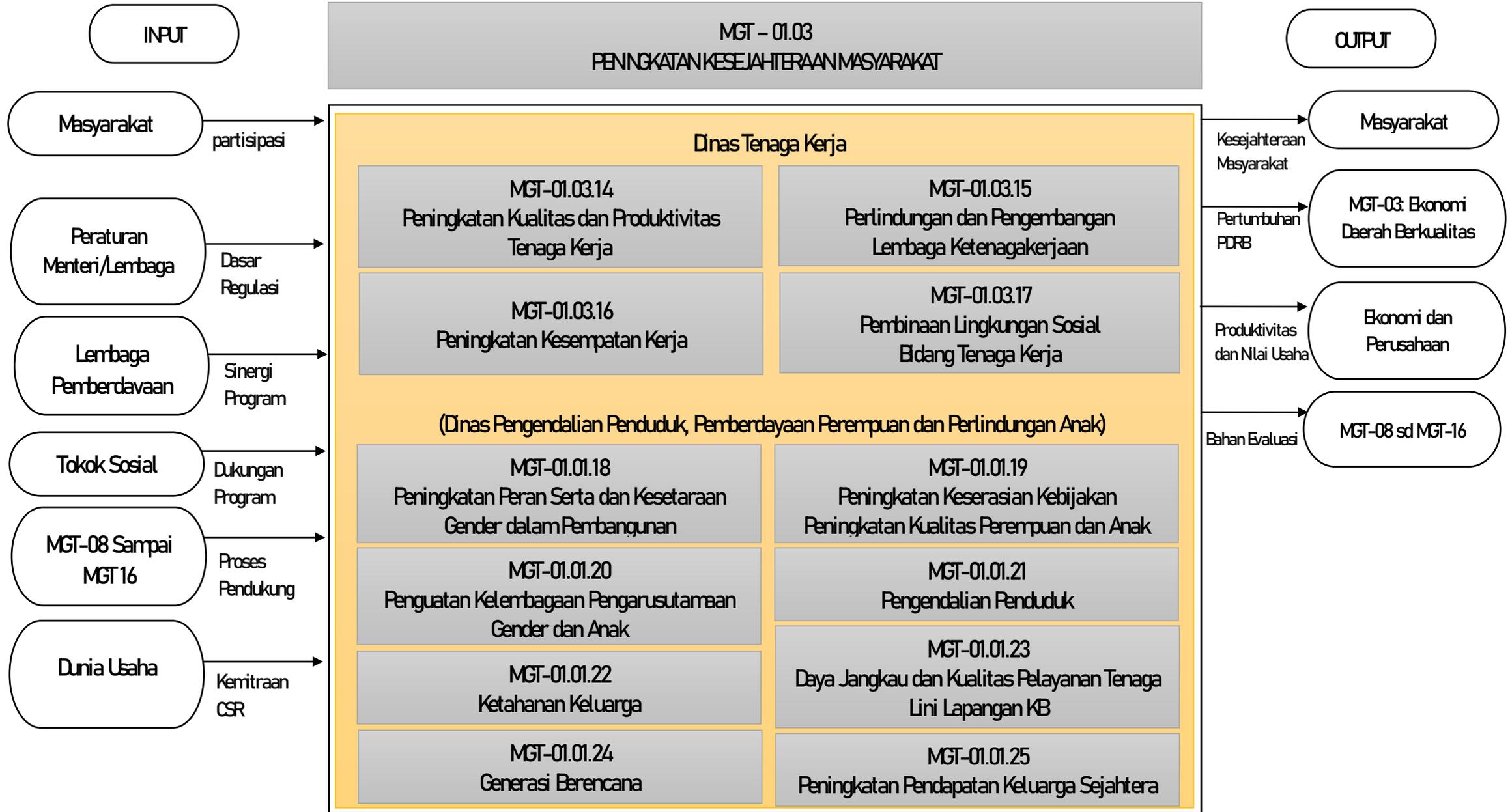
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



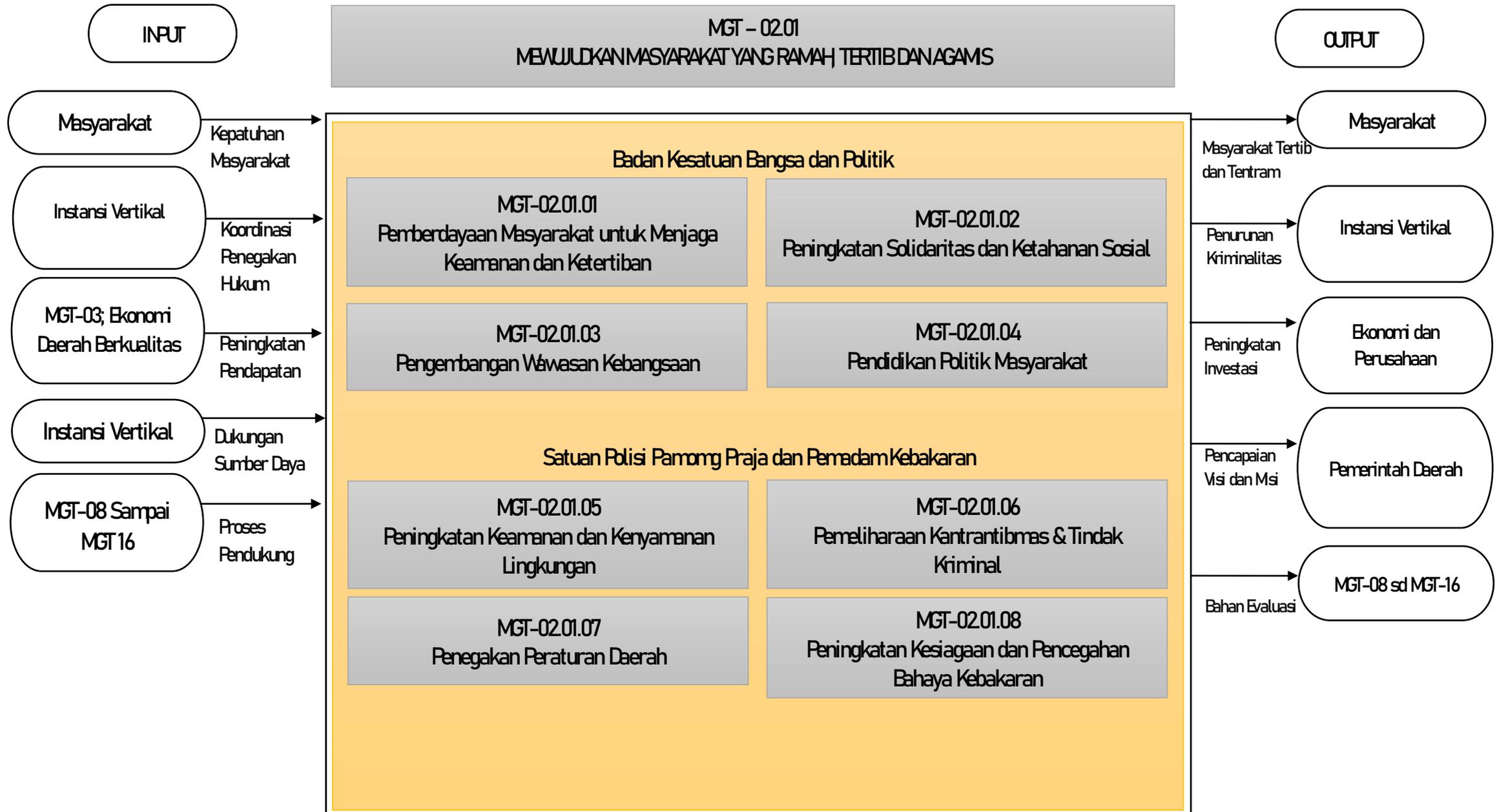
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



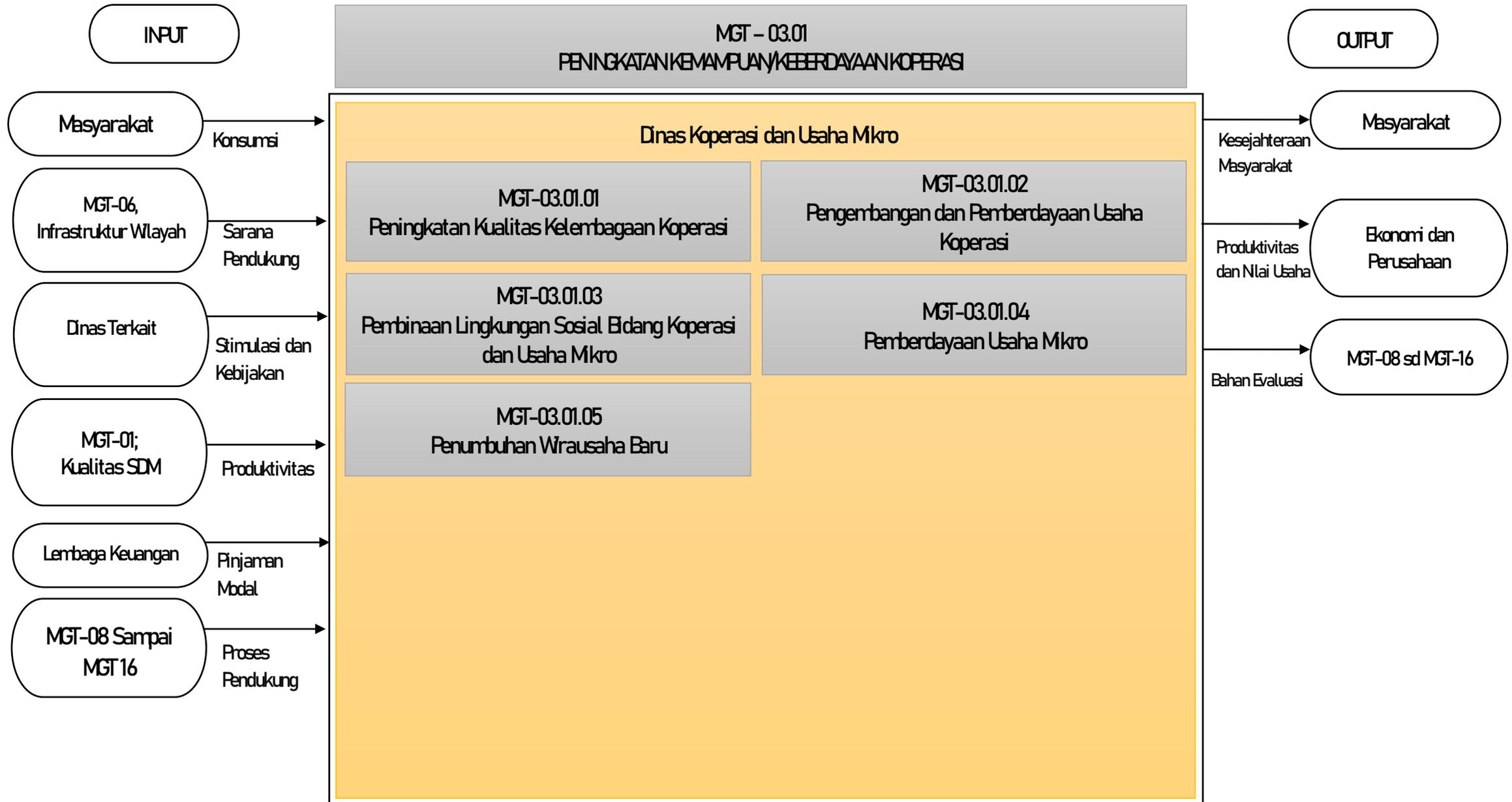
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



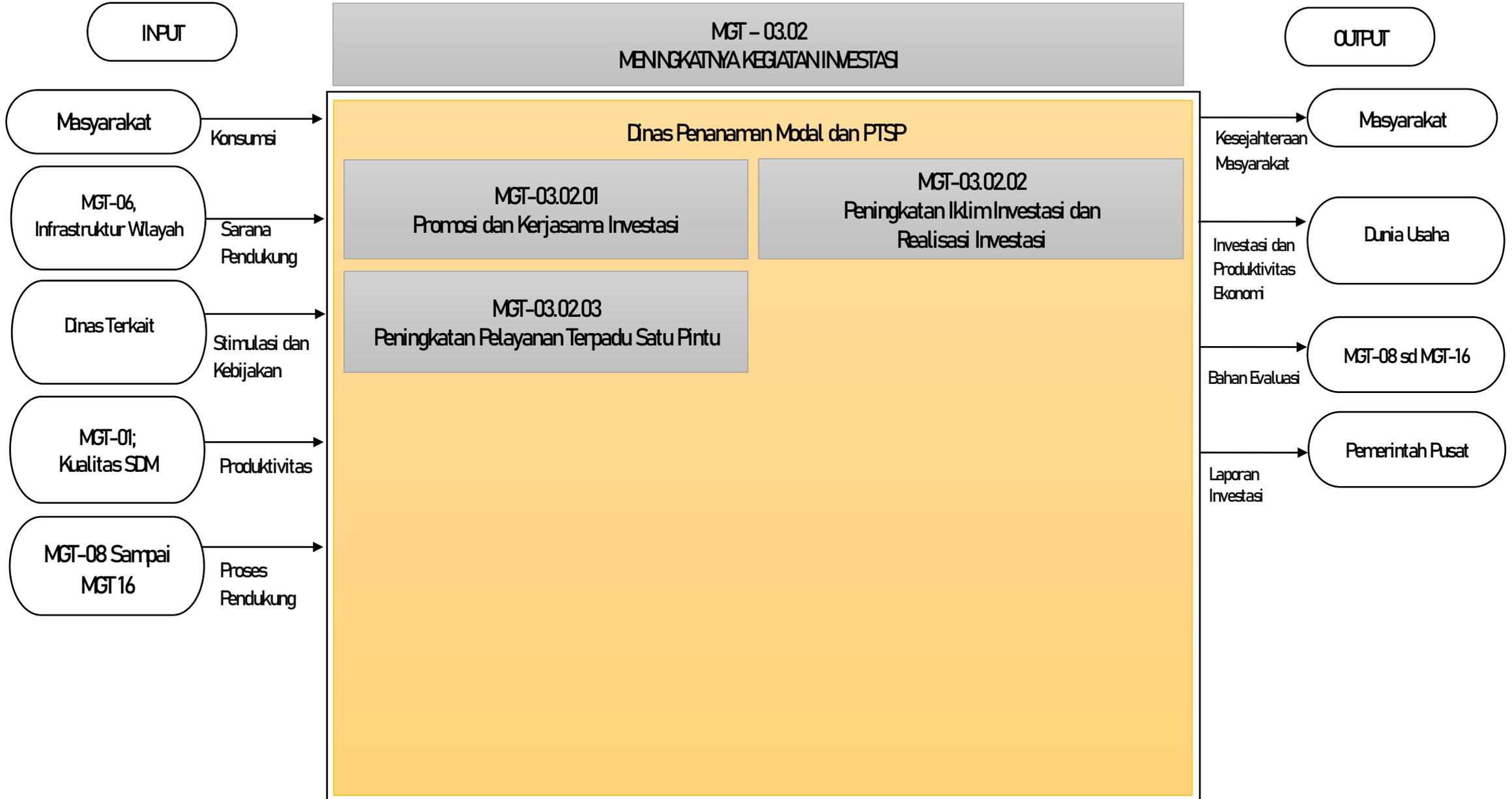
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



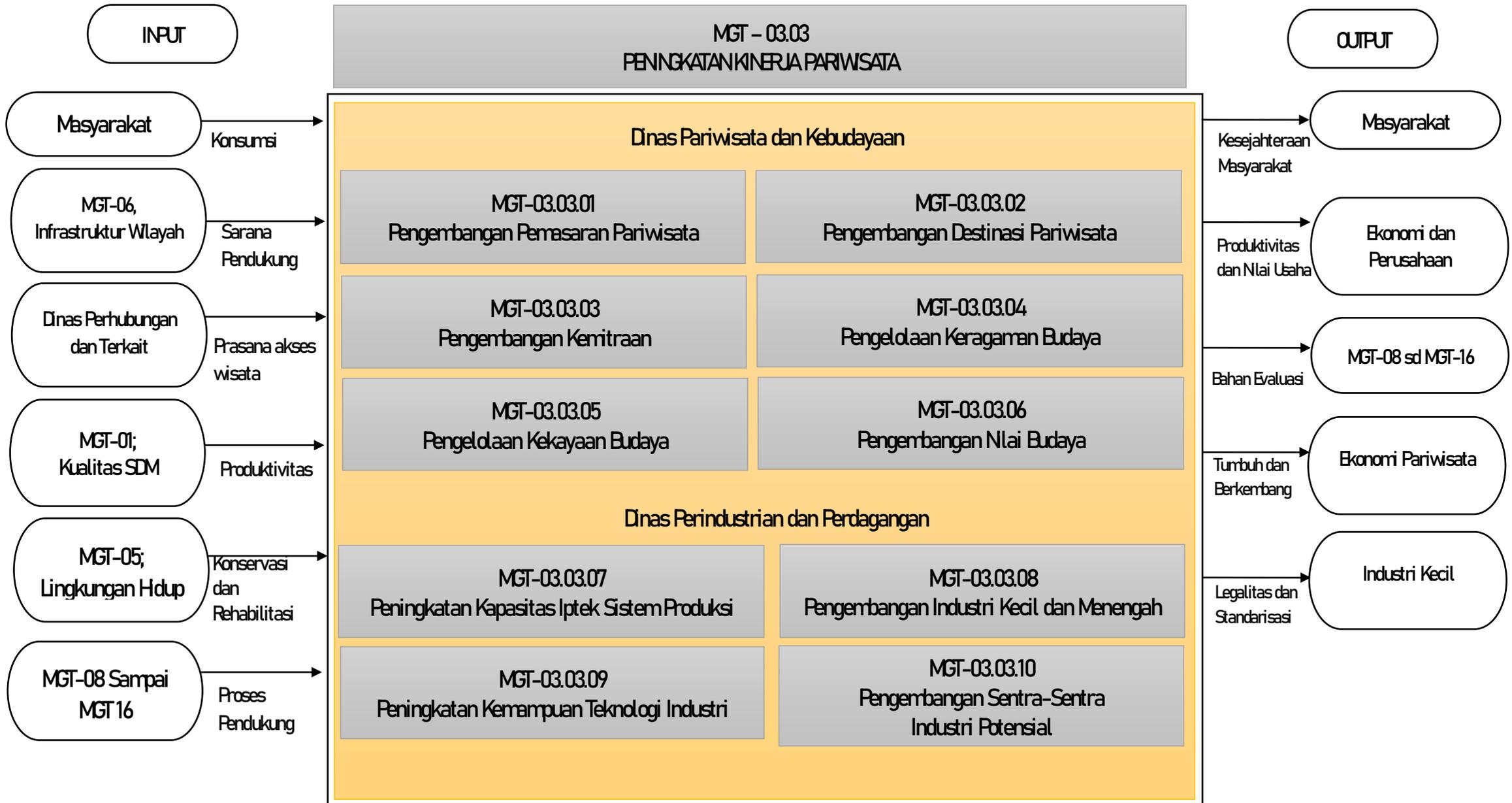
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



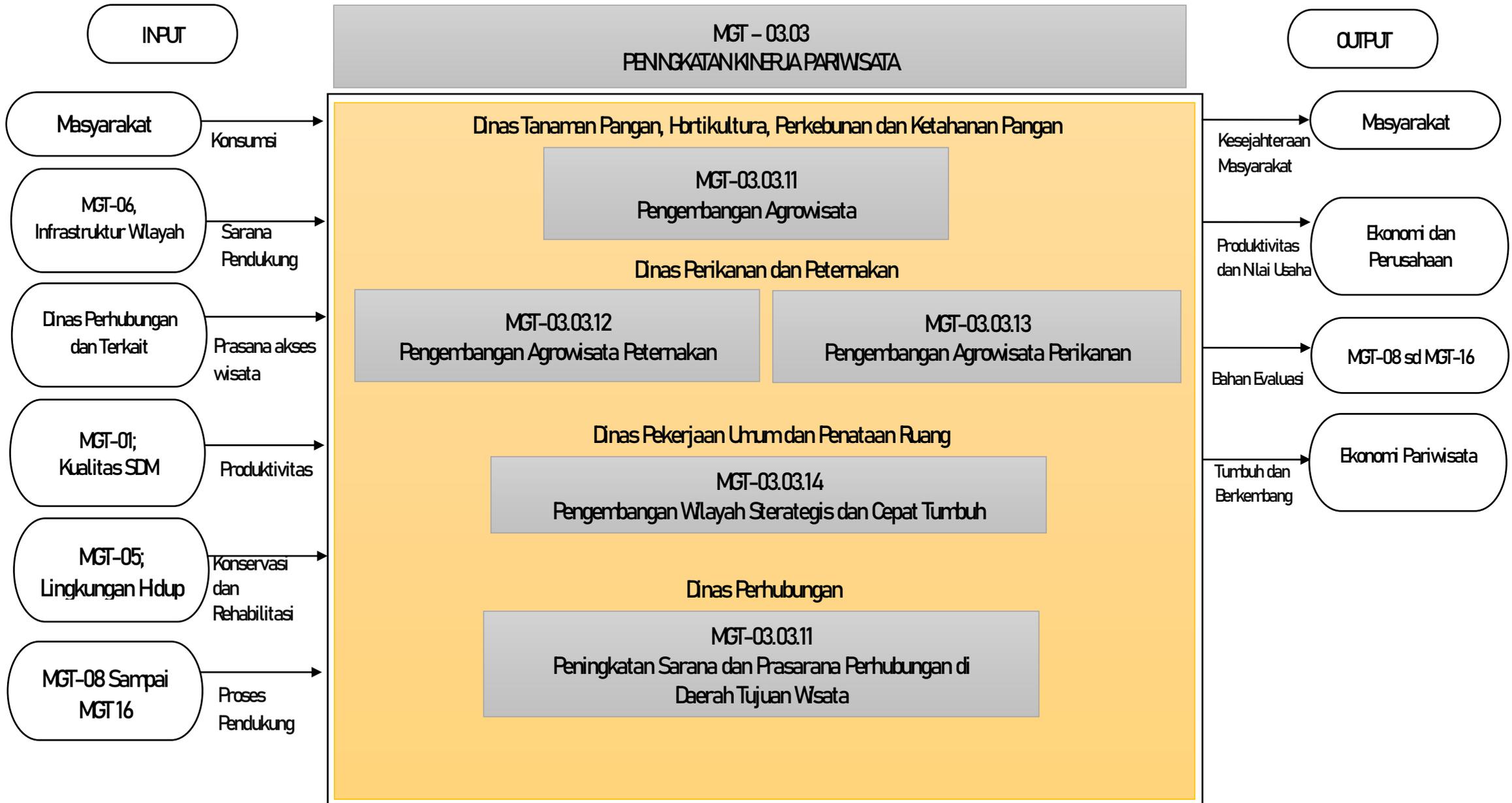
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



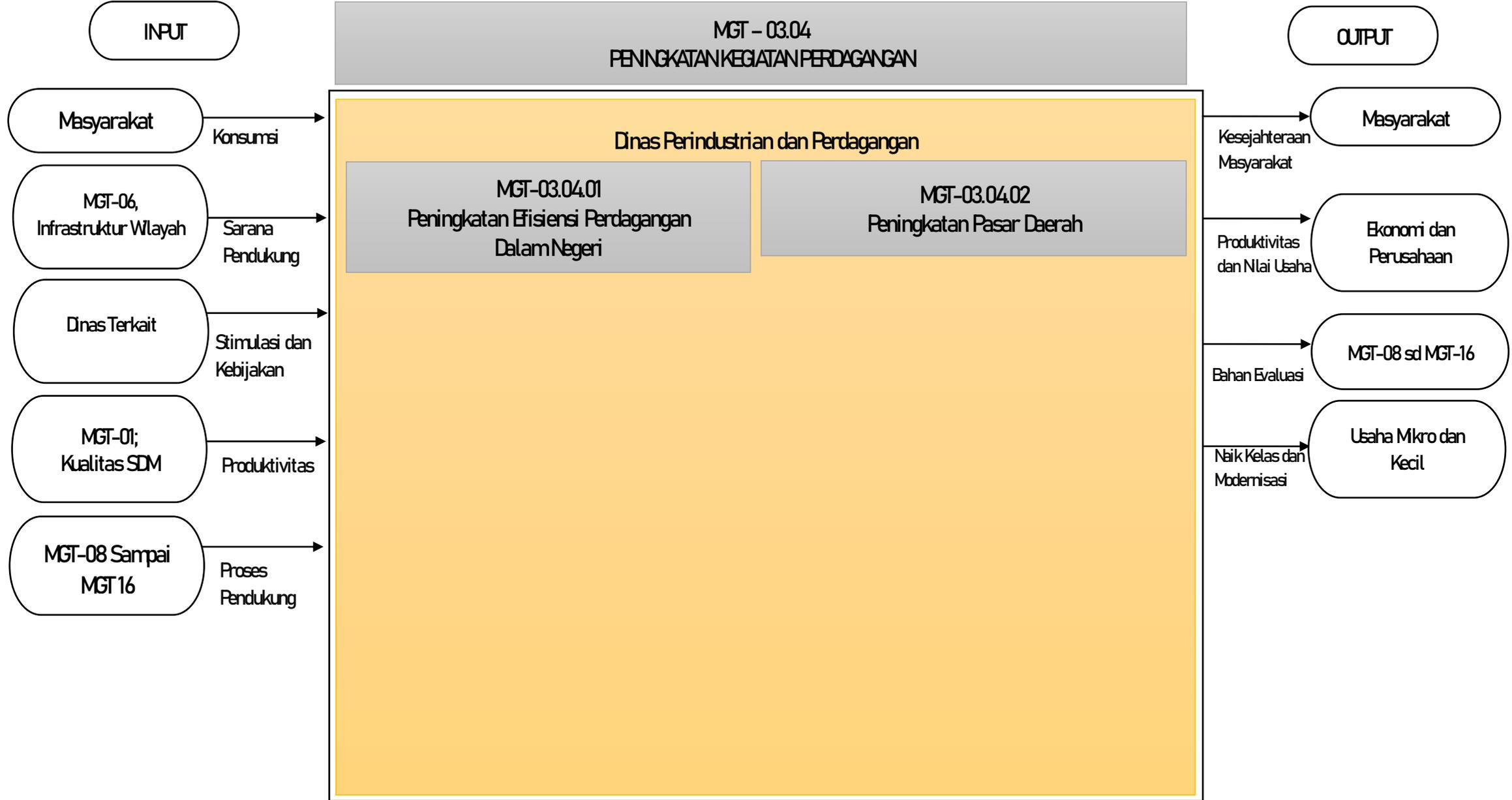
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



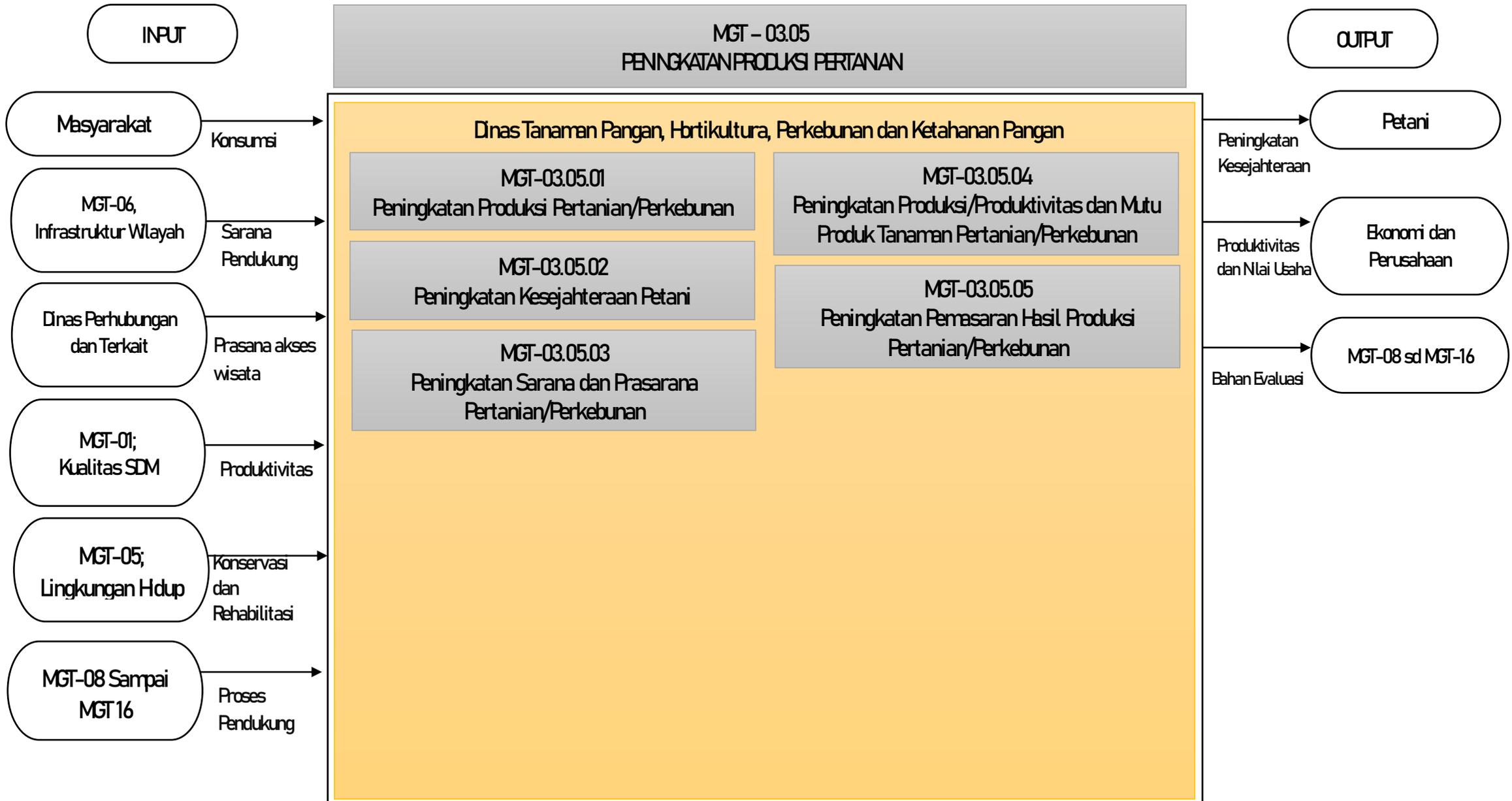
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



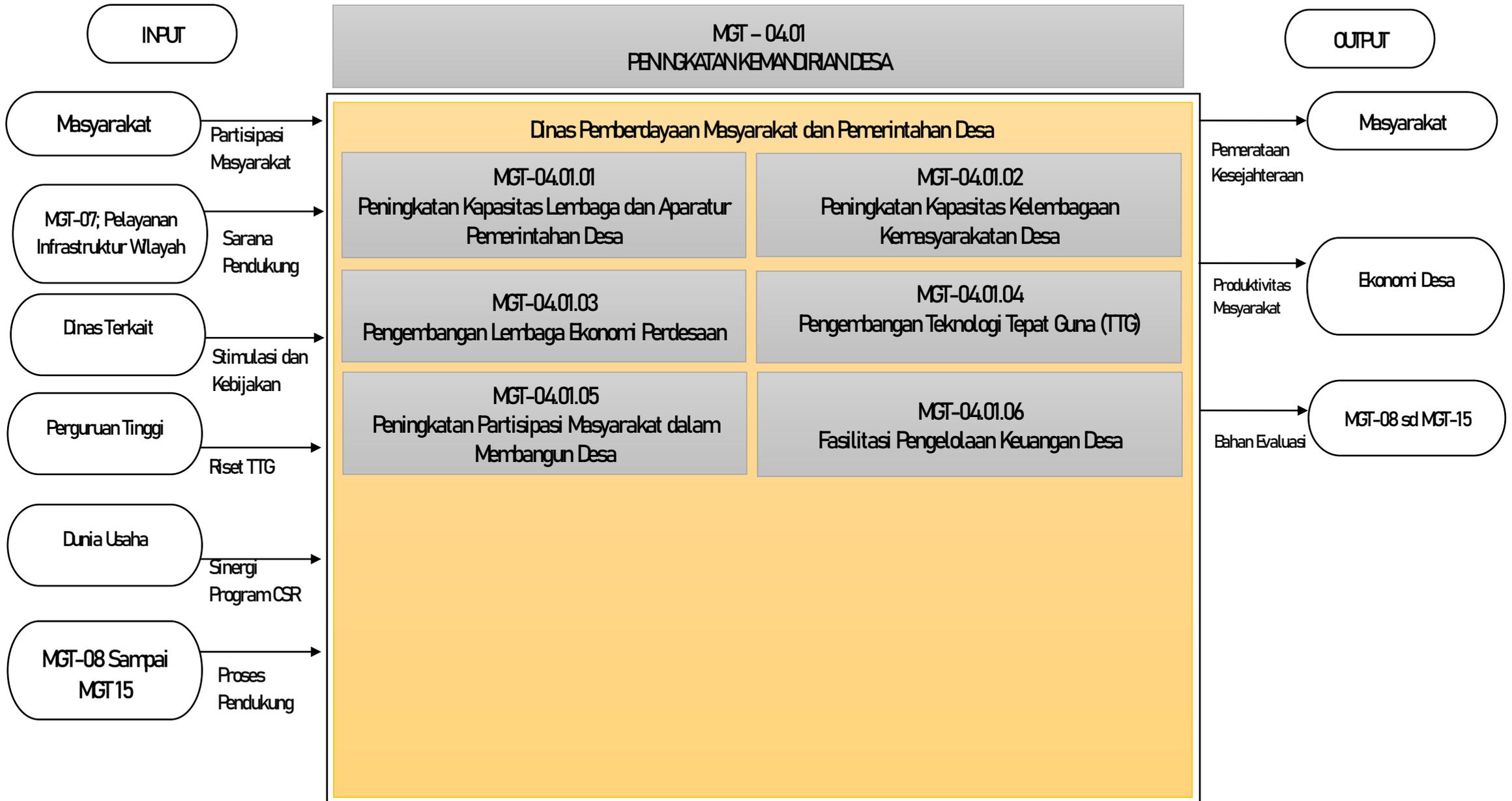
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



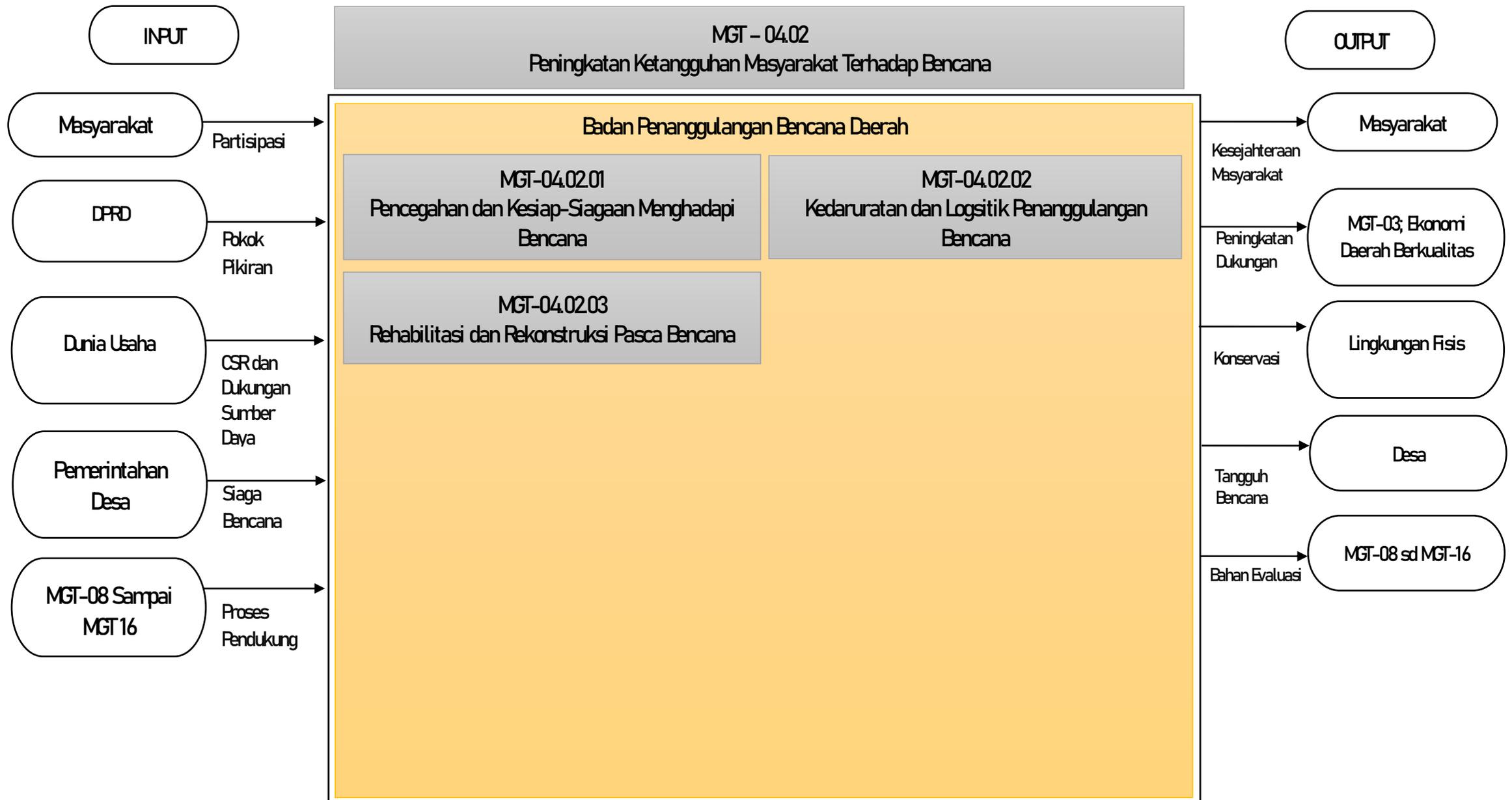
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



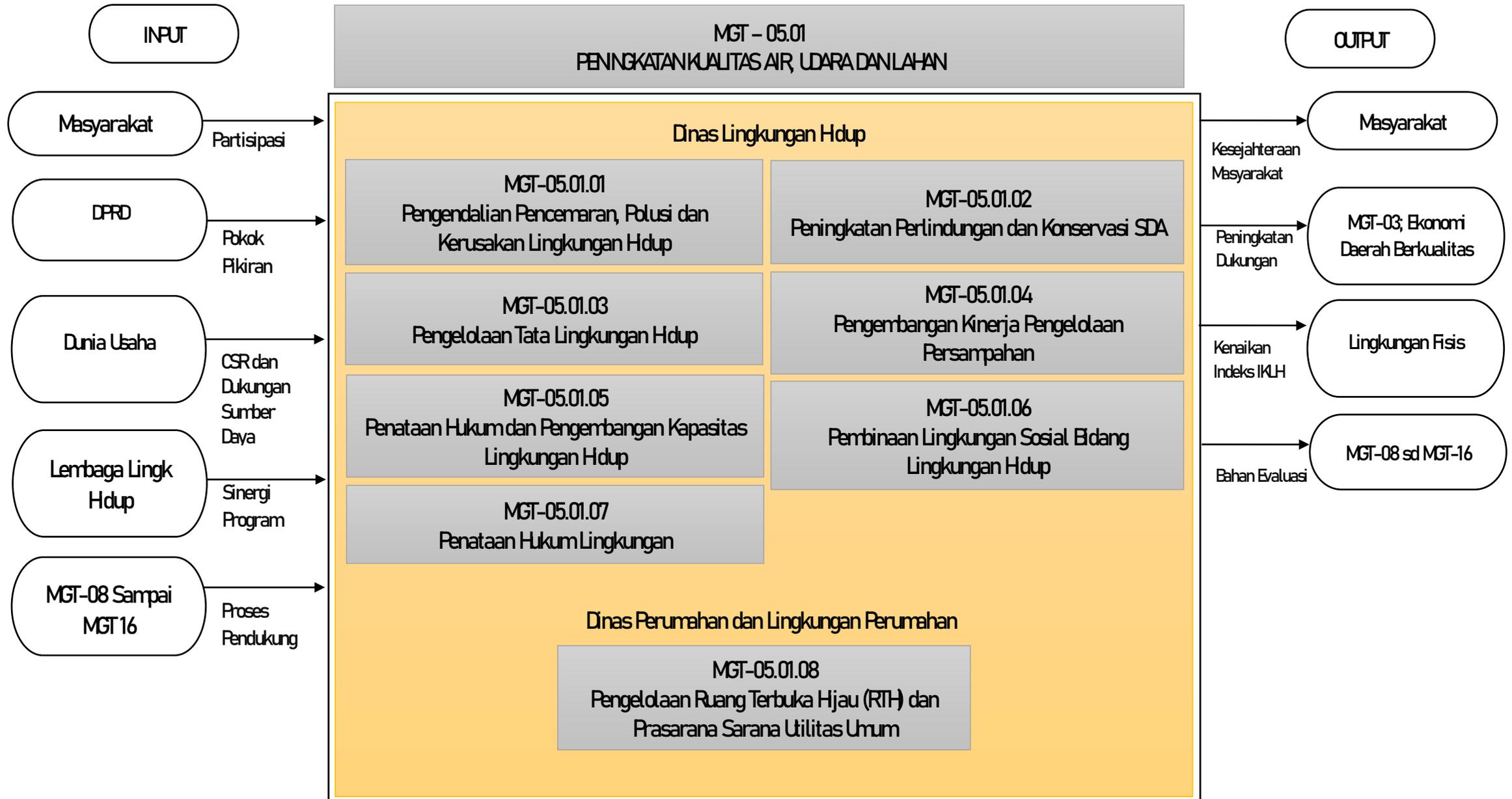
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



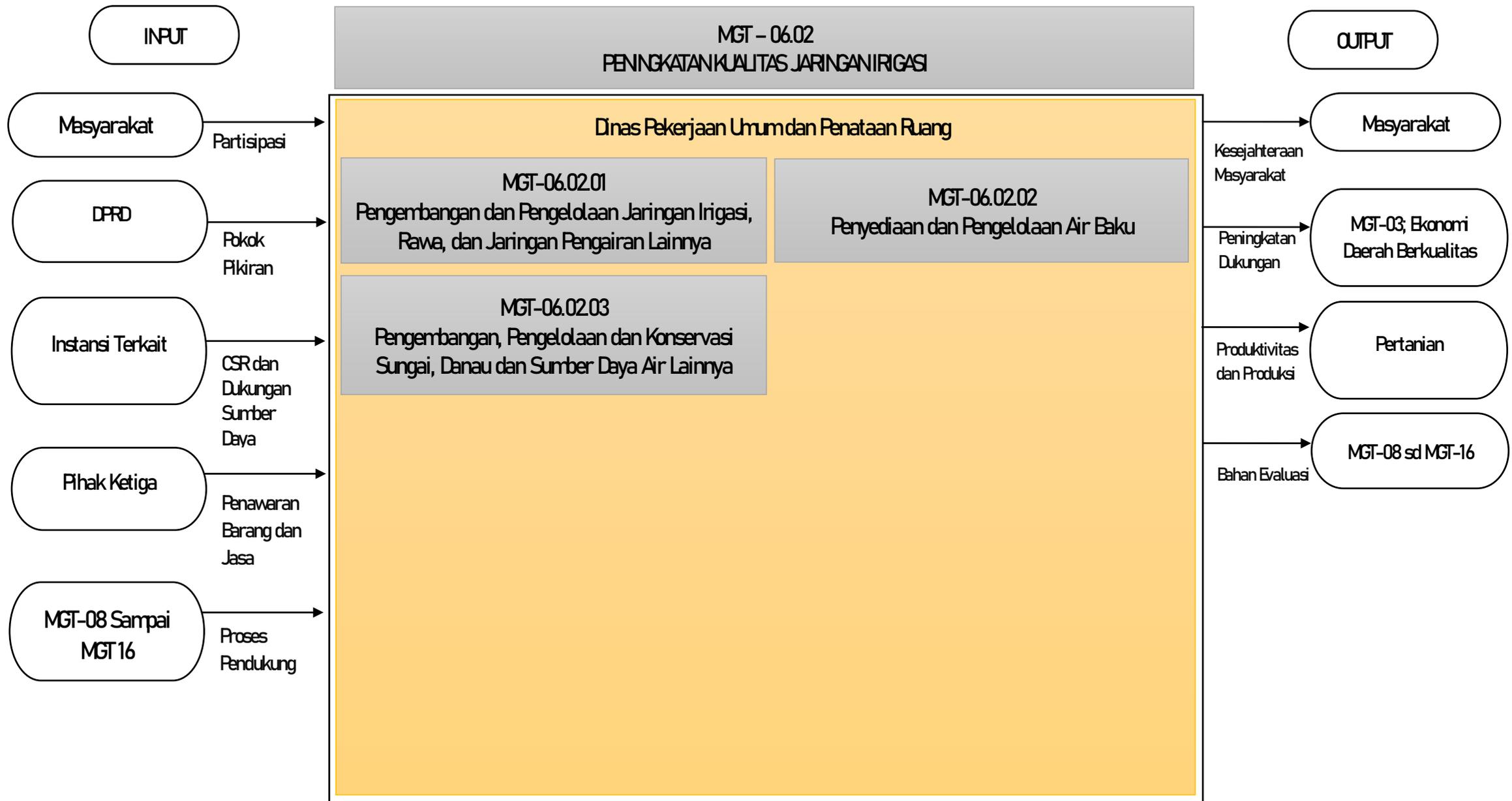
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



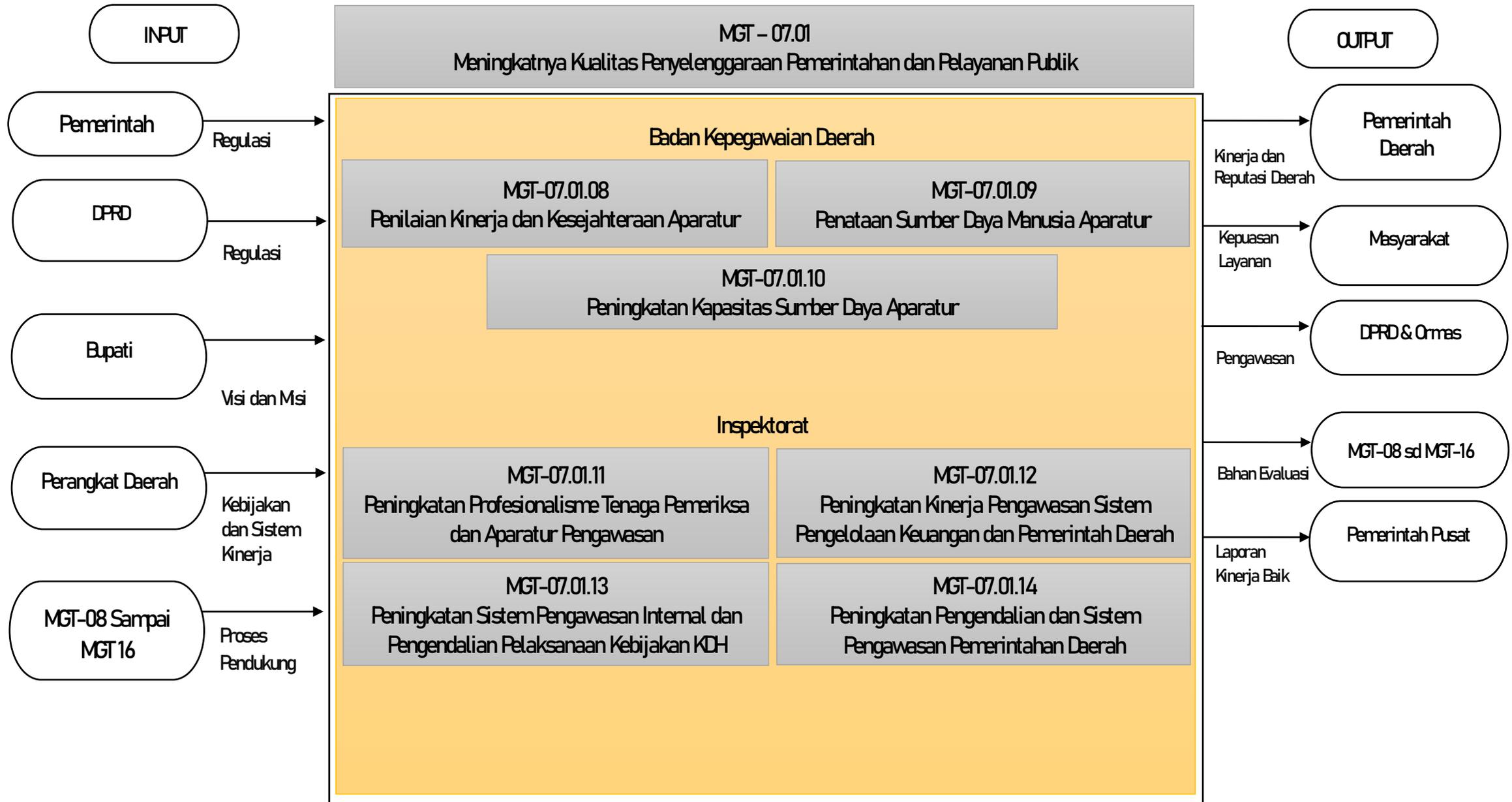
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



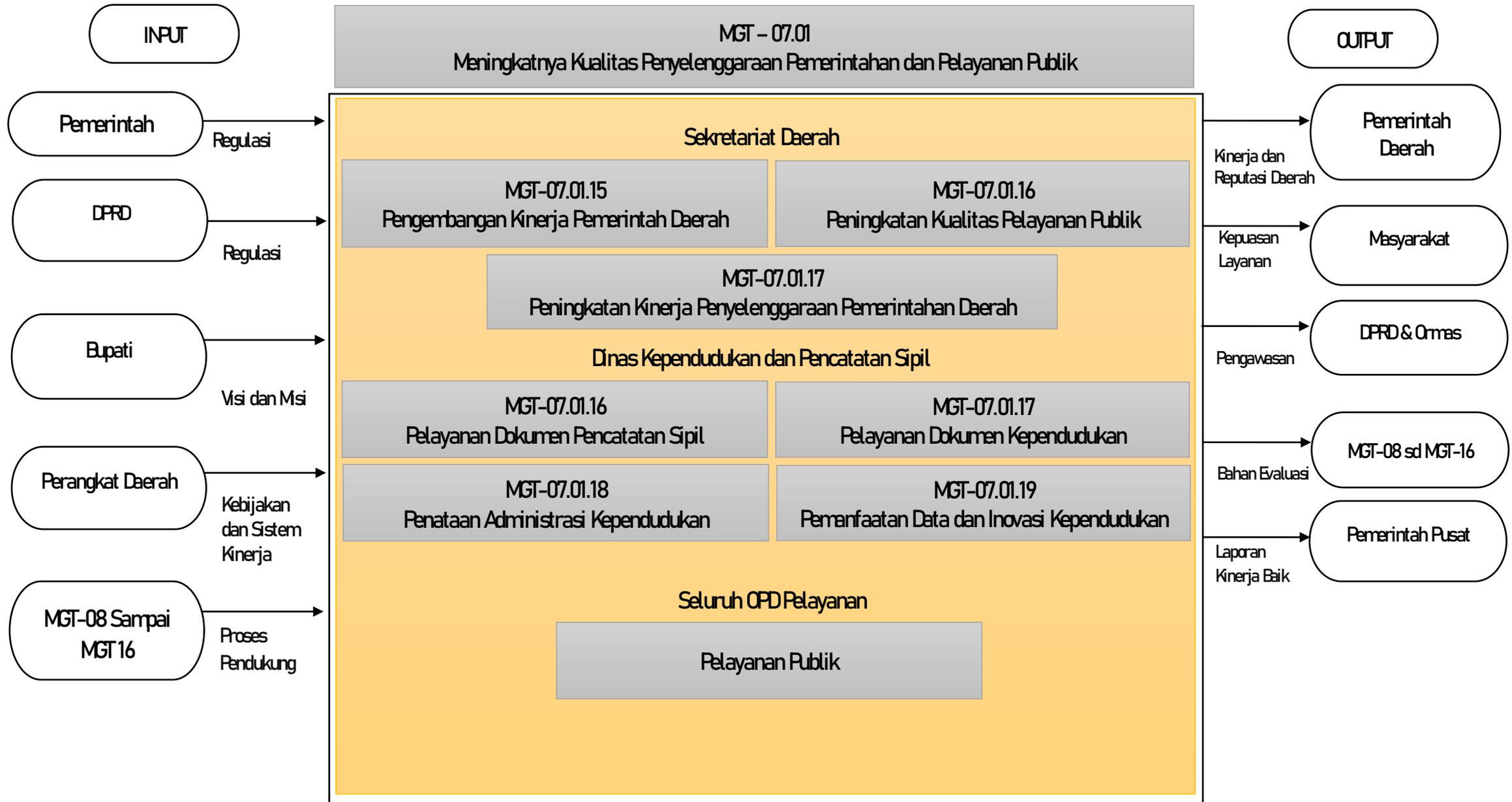
PETA PROSES BISNIS LEVEL 2 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



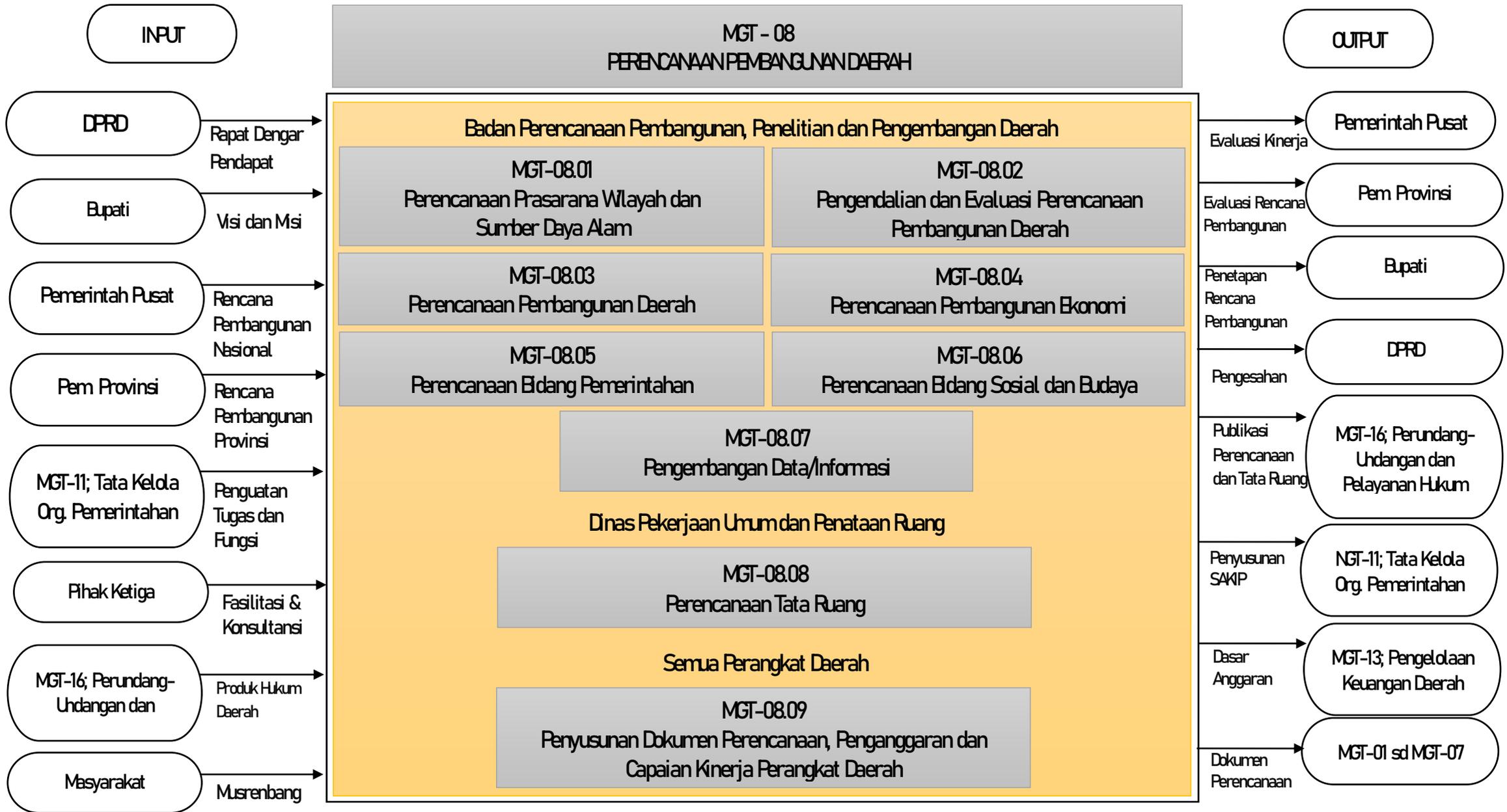
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



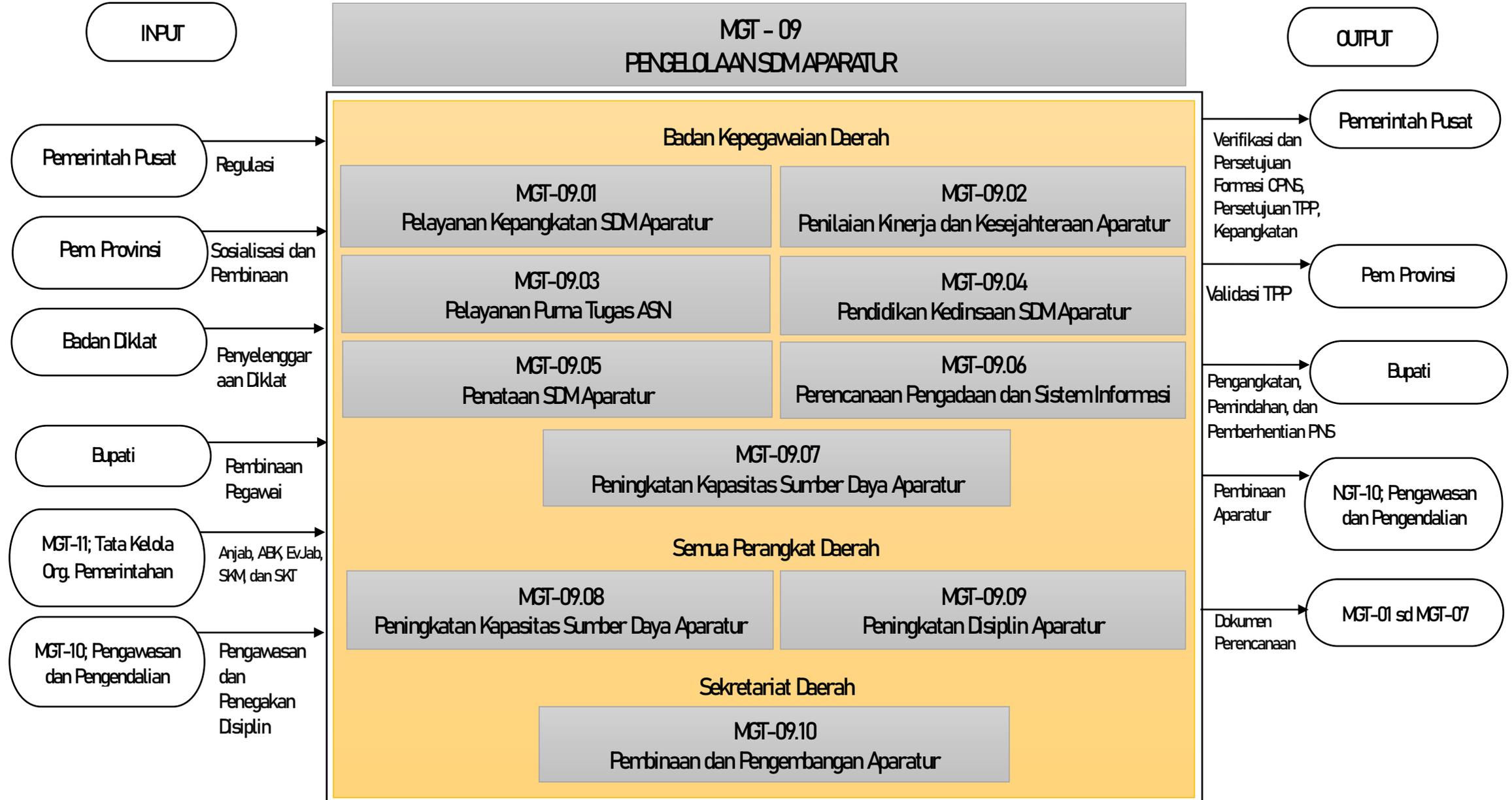
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



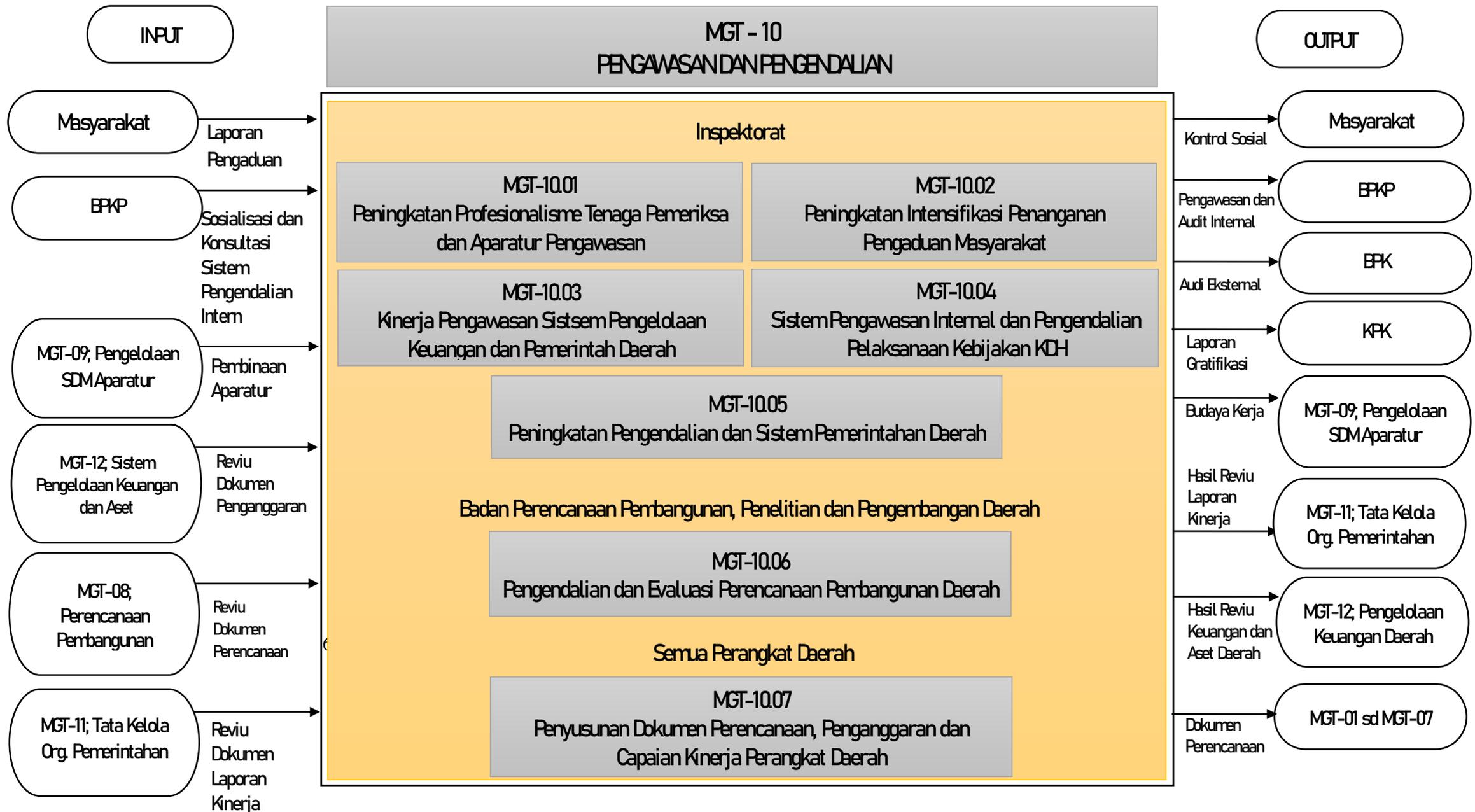
PETA PROSES BISNIS PENDUKUNG LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



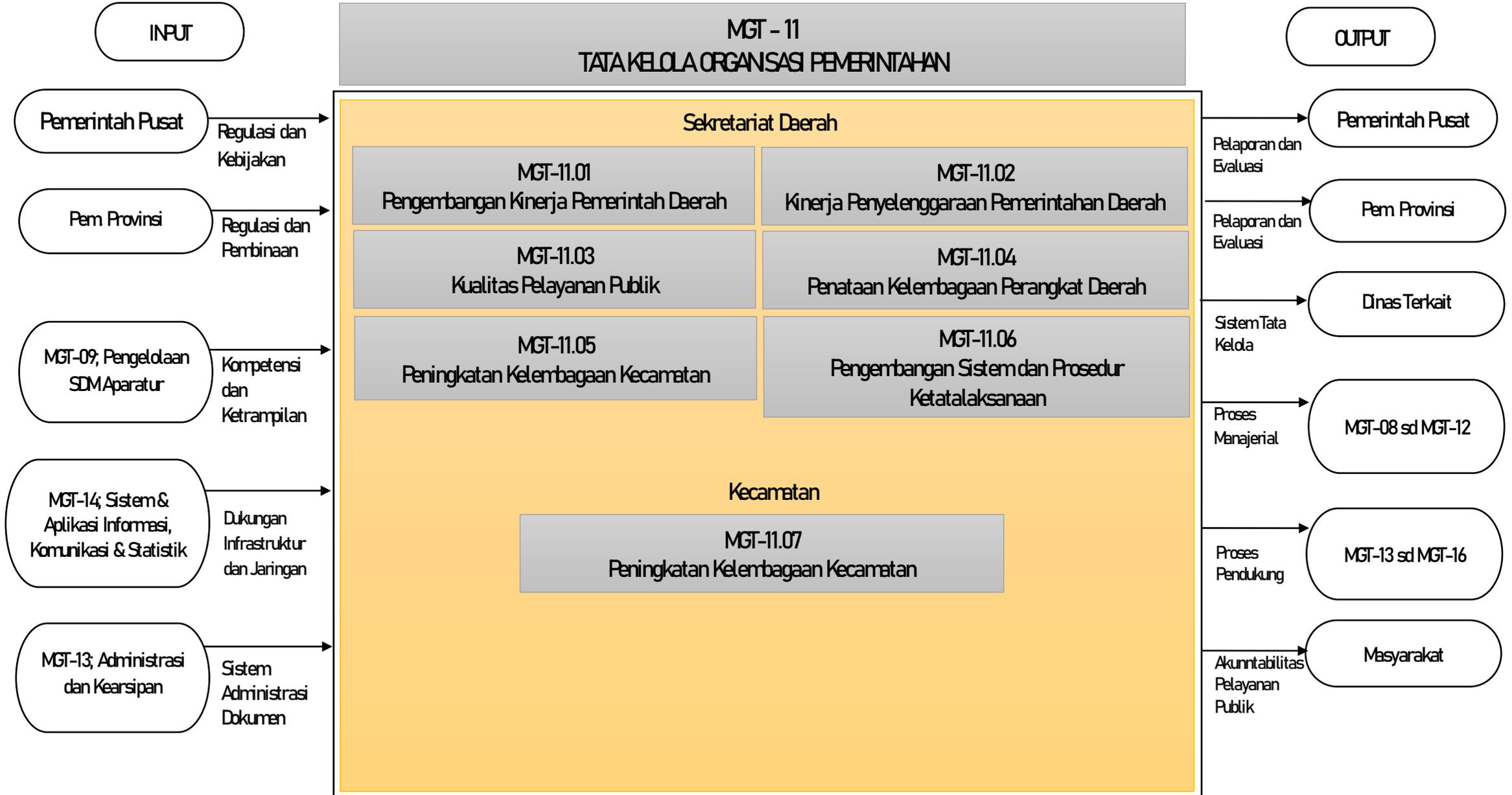
PETA PROSES BISNIS PENDUKUNG LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



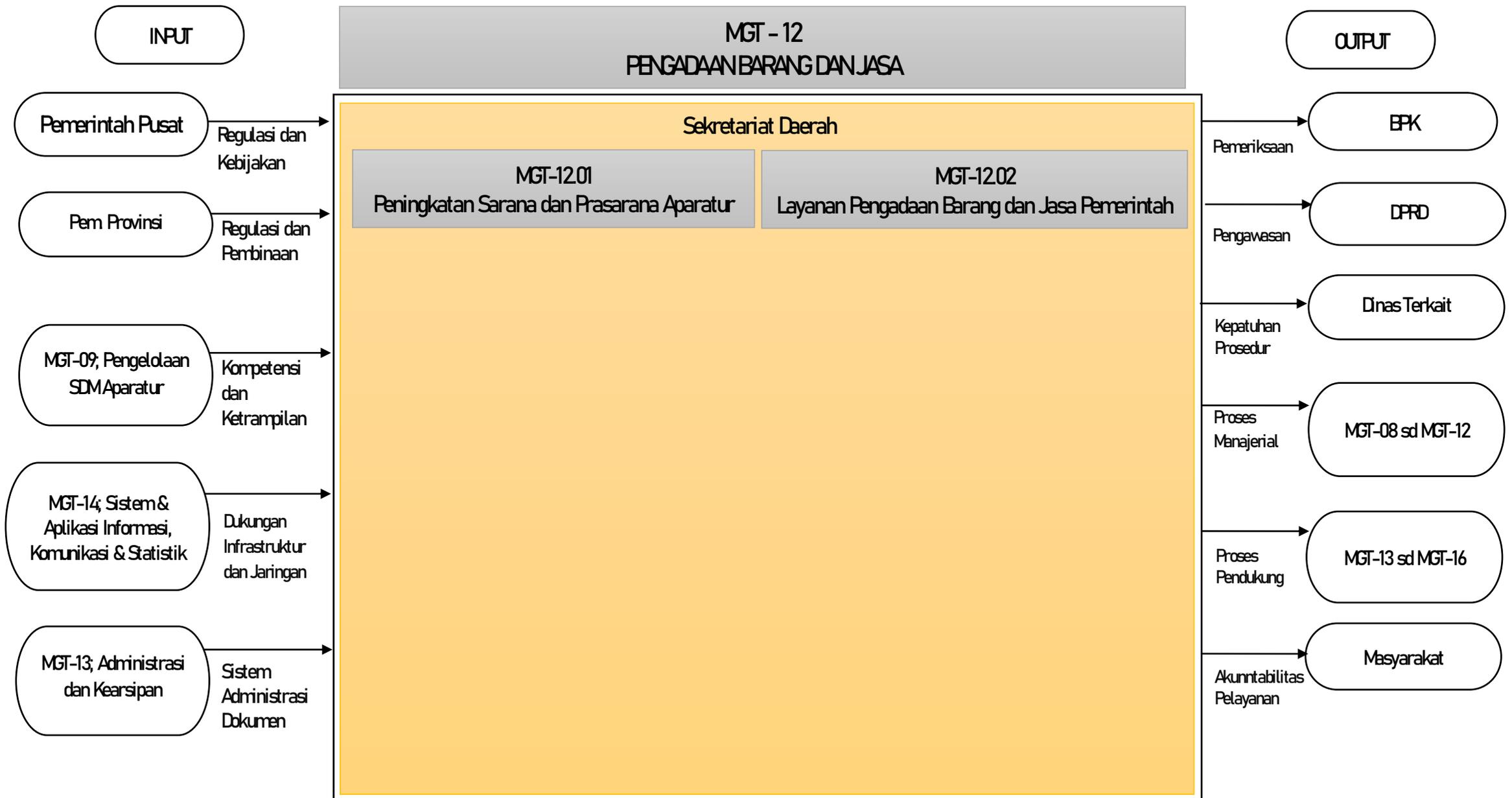
PETA PROSES BISNIS PENDUKUNG LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



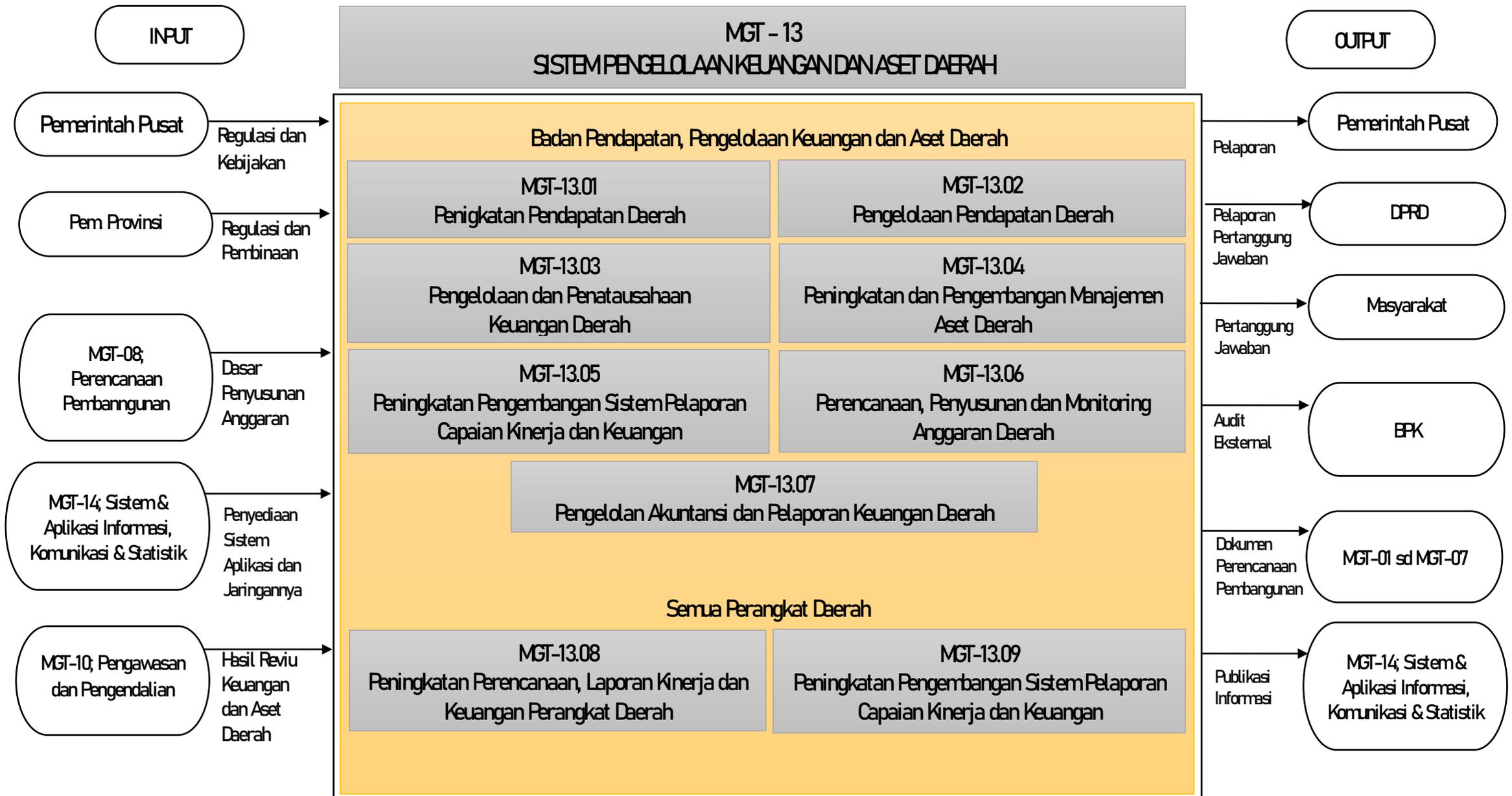
PETA PROSES BISNIS PENDUKUNG LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



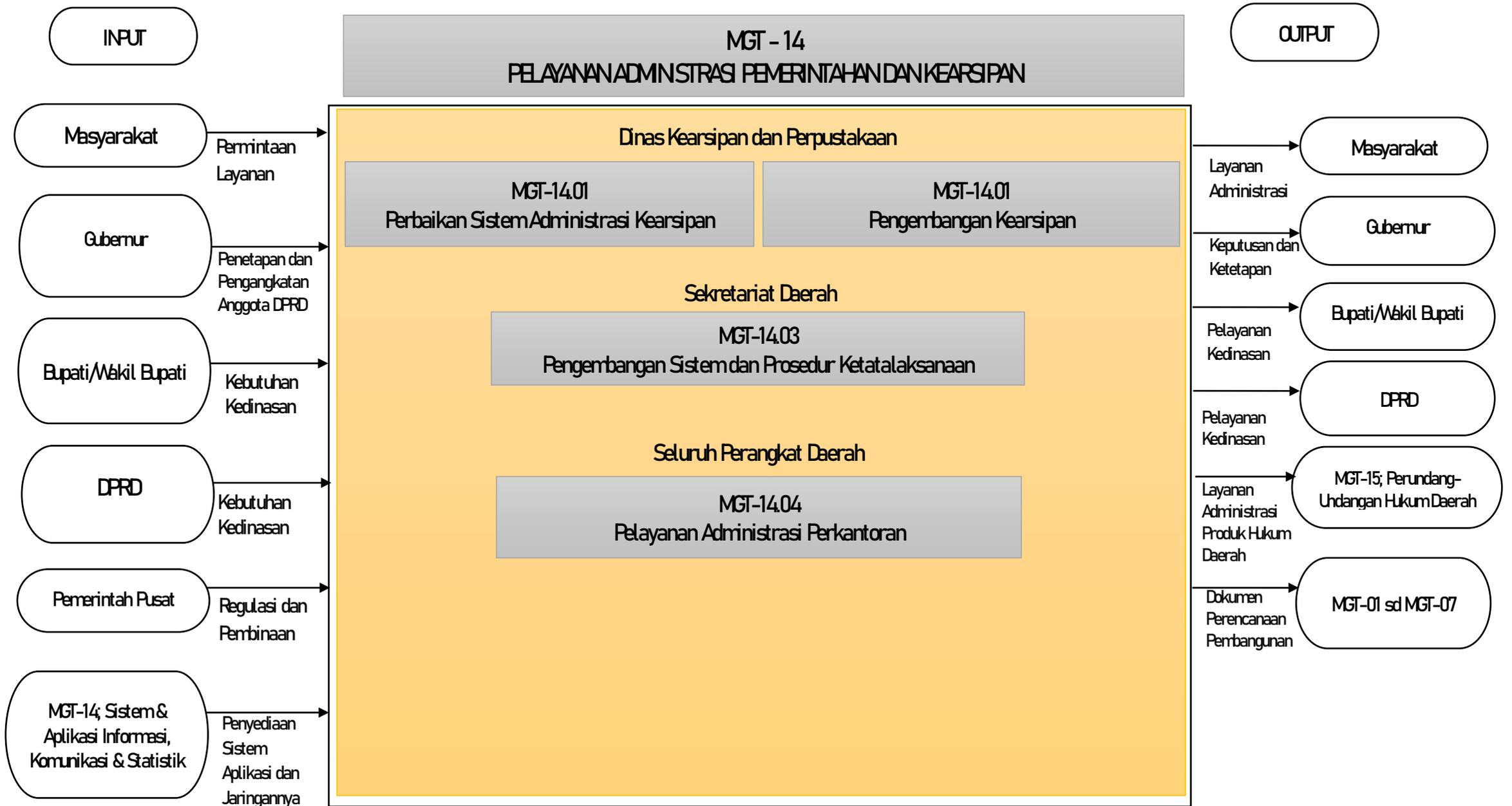
PETA PROSES BISNIS PENDUKUNG LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



PETA PROSES BISNIS PENDUKUNG LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



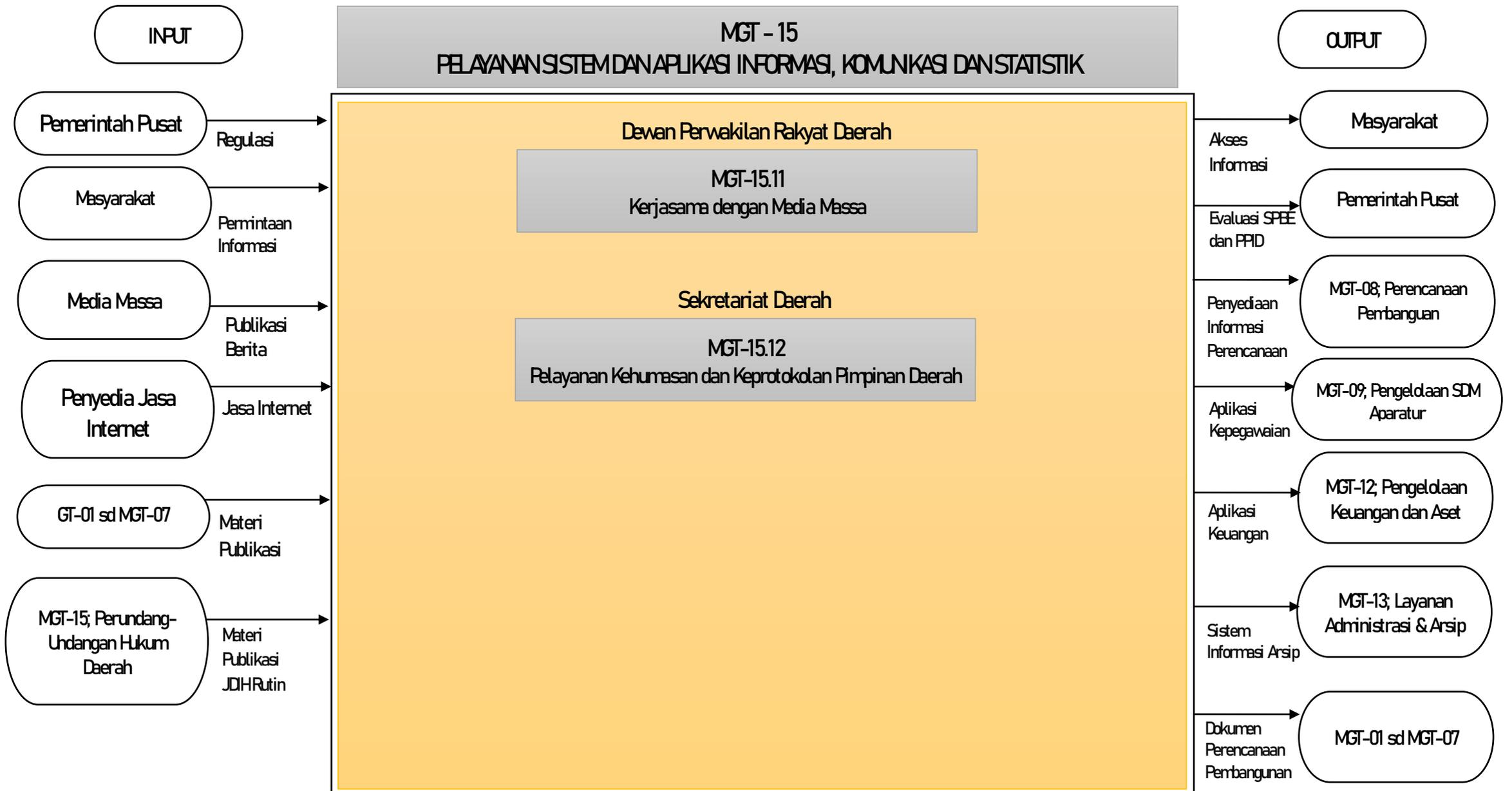
PETA PROSES BISNIS PENDUKUNG LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



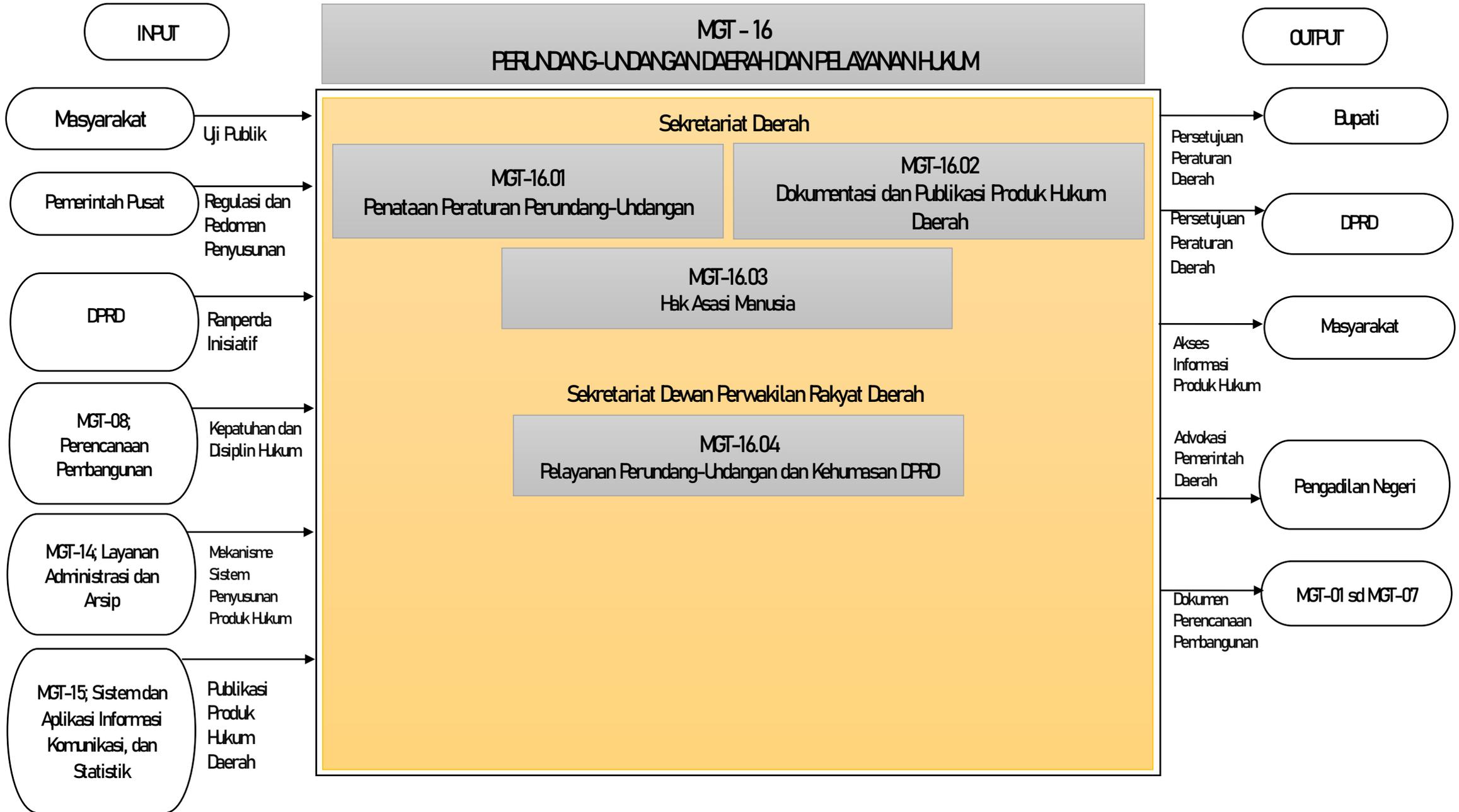
PETA PROSES BISNIS PENDUKUNG LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



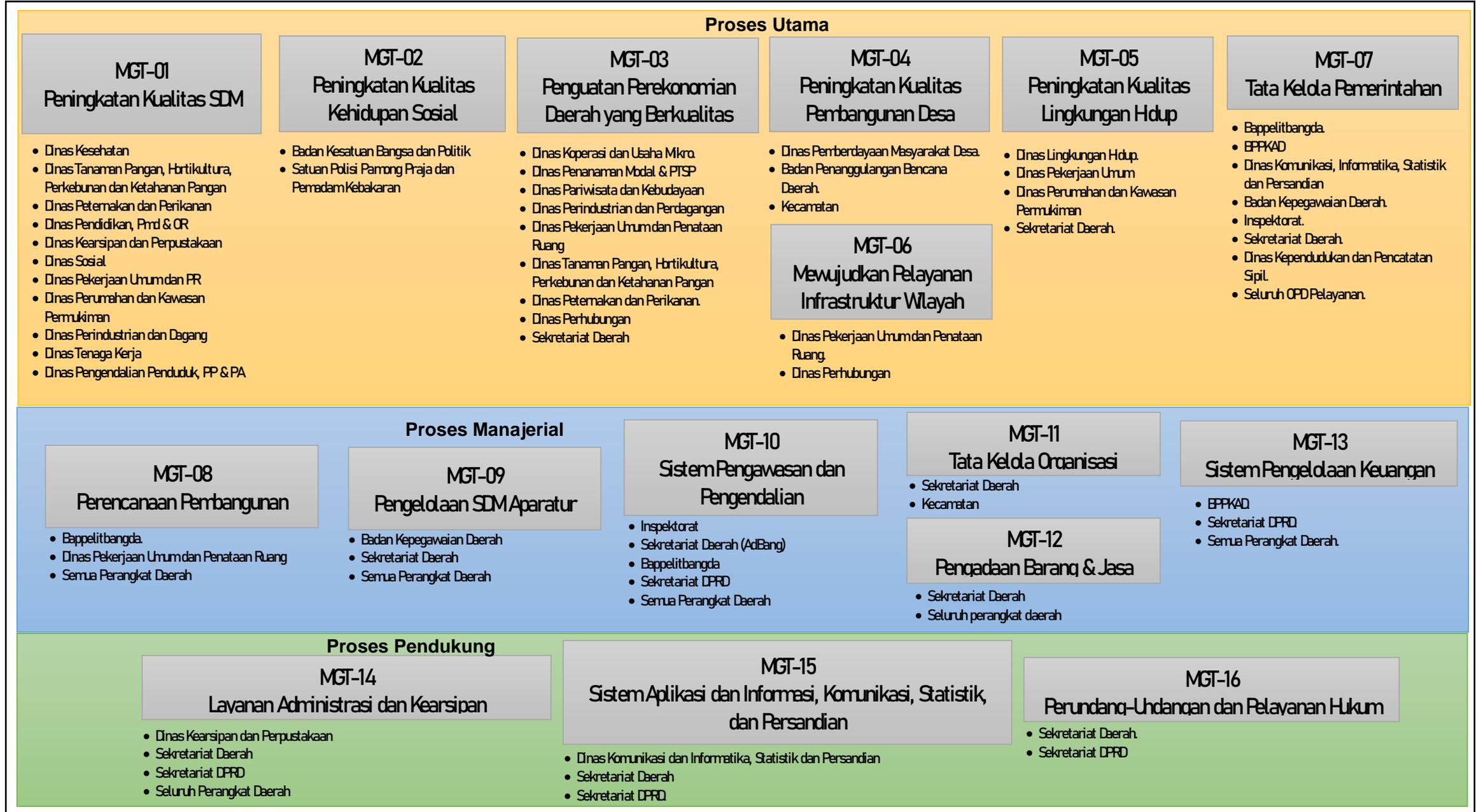
PETA PROSES BISNIS PENDUKUNG LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



PETA PROSES BISNIS PENDUKUK LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



B. PETA RELASI PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN



PETA RELASI

MGT - 01
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan
Ketahanan Pangan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Dinas Sosial

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

PETA RELASI

MGT - 02
PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

PETA RELASI

MGT - 03

PENGUATAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERKUALITAS

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan
Ketahanan Pangan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Peternakan dan Perikanan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perhubungan

Dinas Tenaga Kerja

Sekretariat Daerah

PETA RELASI

MGT - 04
PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kecamatan

PETA RELASI

MGT - 05
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HDUP

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bagian Hukum
(Sekretariat Daerah)

Bagian Sumber Daya Alam
(Sekretariat Daerah)

PETA RELASI

MGT - 06

MEWUJUDKAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Perhubungan

PETA RELASI

MGT - 07
TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Badan Kepegawaian Daerah

Inspektorat

Sekretariat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Seluruh Perangkat Daerah Pelayanan

PETA RELASI

MGT - 08
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Semua Perangkat Daerah

PETA RELASI

MGT - 09
PENGLOLAAN SDM APARATUR

Badan Kepegawaian Daerah

Inspektorat

Semua Perangkat Daerah

Bagian Organisasi
(Sekretariat Daerah)

PETA RELASI

MGT - 10
SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Inspektorat

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bagian Administrasi Pembangunan
(Sekretariat Daerah)

Bagian Hukum
(Sekretariat Daerah)

Semua Perangkat Daerah

PETA RELASI

MGT - 11
TATA KELOLA ORGANSASI PEMERINTAHAN

Bagian Organisasi
(Sekretariat Daerah)

Kecamatan

Semua Perangkat Daerah



MGT - 12
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
(Sekretariat Daerah)

Seluruh Perangkat Daerah

PETA RELASI

MGT - 13
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Inspektorat

Sekretariat DPRD

Semua Perangkat Daerah

PETA RELASI

MGT - 14
LAYANAN ADMINISTRASI DAN KEARSIPAN

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Bagian Umum
(sekretariat Daerah)

Sekretariat DPRD

Semua Perangkat Daerah

PETA RELASI

MGT - 15

SISTEM APLIKASI DAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN STATISTIK

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian

Bagian Humas dan Protokol
(Sekretariat Daerah)

Sekretariat DPRD

PETA RELASI

MGT - 16
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Hukum
(Sekretariat Daerah)

Sekretariat DPRD

Semua Perangkat Daerah (pengusul)

B. PENJABARAN PETA PROSES BISNIS UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

No	Kode Proses	Proses Utama/Pendukung	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses	Kode Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi
1	2	3	4	5	6	7
Misi 1: Meningkatkan Percepatan dan Perluasan Pembentukan Sumber Daya Manusia yang SMART (Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil)						
1.	MGT-01	Peningkatan Kualitas SDM - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	MGT-01.01	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat - Indeks Kesehatan	Dinas Kesehatan	
					MGT-01.01 CFM.1	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
					MGT-01.01 CFM.2	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
					MGT-01.01 CFM.3	Standarisasi Pelayanan Kesehatan
					MGT-01.01 CFM.4	Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
					MGT-01.01 CFM.5	Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan
					MGT-01.01 CFM.6	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.
					MGT-01.01 CFM.7	Pelayanan Kesehatan Puskesmas
					MGT-01.01 CFM.8	Peningkatan Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
					MGT-01.01 CFM.9	Peningkatan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
					Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
			MGT-01.01 CFM.10	Peningkatan Ketahanan Pangan		
			Dinas Peternakan dan Perikanan			
			MGT-01.01 CFM.11	Peningkatan Kesehatan Pangan Hewani		
MGT-01.02	Peningkatan Taraf Pendidikan Masyarakat	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga				
MGT-01.02 CFM.1	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini					

No	Kode Proses	Proses Utama/Pendukung	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses	Kode Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi
				- Indeks Pendidikan	MGT-01.02 CFM.2	Peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
					MGT-01.02 CFM.3	Peningkatan Pendidikan Non-formal
					MGT-01.02 CFM.4	Manajemen Pelayanan Pendidikan
					MGT-01.02 CFM.5	Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan
					MGT-01.02 CFM.6	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
					MGT-01.02 CFM.7	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
					MGT-01.02 CFM.8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
					MGT-01.02 CFM.9	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
					MGT-01.02 CFM.10	Pengembangan Perpustakaan
			MGT-01.03	Peningkatan Kesejahteraan Sosial - Angka Kemiskinan - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Sosial	
					MGT-01.03 CFM.1	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
					MGT-01.03 CFM.2	Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
					MGT-01.03 CFM.3	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
					MGT-01.03 CFM.4	Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
					MGT-01.03 CFM.5	Bantuan dan Perlindungan Sosial
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					MGT-01.03 CFM.6	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				MGT-01.03 CFM.7 Pengembangan dan Penataan Lingkungan Sehat Perumahan
				MGT-01.03 CFM.8 Peningkatan Kualitas Permukiman
				Dinas Kesehatan
				MGT-01.03 CFM.9 Peningkatan Kemitraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				MGT-01.03 CFM.10 Peningkatan Kesejahteraan Petani Miskin
				Dinas Peternakan dan Perikanan
				MGT-01.03 CFM.11 Pemberdayaan Petani Ternak
				MGT-01.03 CFM.12 Pemberdayaan Petani Ikan
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				MGT-01.03 CFM.13 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
				Dinas Tenaga Kerja
				MGT-01.03 CFM.14 Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
				MGT-01.03 CFM.15 Peningkatan Kesempatan Kerja
				MGT-01.03 CFM.16 Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
				MGT-01.03 CFM.17 Pembinaan Lingkungan Sosial Tenaga Kerja
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				MGT-01.03 CFM.18 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
				MGT-01.03 CFM.19 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak

					MGT-01.03 CFM.20	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
					MGT-01.03 CFM.21	Pengendalian Penduduk
					MGT-01.03 CFM.22	Peningkatan Ketahanan Keluarga
					MGT-01.03 CFM.23	Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lapangan KB
					MGT-01.03 CFM.24	Peningkatan Generasi Berencana
					MGT-01.03 CFM.25	Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
2.	MGT-02	Peningkatan Kualitas Kehidupan Sosial - Indeks Kesalehan Sosial	MGT-02.01	Mewujudkan Masyarakat yang Ramah, Tertib dan Agamis - Indeks Toleransi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					MGT-02.01 CFM.1	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
					MGT-02.01 CFM.2	Peningkatan Solidaritas dan Ketahanan Sosial
					MGT-02.01 CFM.3	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
					MGT-02.01 CFM.4	Pendidikan Politik Masyarakat
					Satuan Polisi Pamong Praja	
					MGT-02.01 CFM.5	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
					MGT-02.01 CFM.6	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
					MGT-02.01 CFM.7	Penegakan Peraturan Daerah
					MGT-02.01 CFM.8	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Misi 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah Melalui Keberpihakan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Basis sekaligus Ujung Tombak Pembangunan Ekonomi Daerah

3.	MGT-03	Penguatan Perekonomian Daerah yang Berkualitas - Angka Pertumbuhan Ekonomi - Indeks Gini	MGT-03.01	Peningkatan Kemampuan /Keberdayaan Koperasi dan usaha Mikro - Nilai Omset Usaha Koperasi - Nilai Omset Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
					MGT-03.01 CFM.1	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
					MGT-03.01 CFM.2	Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Koperasi
					MGT-03.01 CFM.3	Pembinaan Lingkungan Sosial Koperasi dan Usaha Mikro
					MGT-03.01 CFM.4	Pemberdayaan Usaha Mikro
					MGT-03.01 CFM.5	Penumbuhan Wirausaha baru
			MGT-03.02	Peningkatan Kinerja Investasi - Nilai Investasi - Jumlah Investor	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
					MGT-03.02 CFM.1	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
					MGT-03.02 CFM.2	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
					MGT-03.02 CFM.3	Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			MGT-03.03	Peningkatan Kinerja Industri Pariwisata - Nilai PDRB Sektor Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
					MGT-03.03 CFM.1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata
					MGT-03.03 CFM.2	Pengembangan Destinasi Pariwisata
					MGT-03.03 CFM.3	Pengembangan Kemitraan Wisata
					MGT-03.03 CFM.4	Pengelolaan Keragaman Budaya
					MGT-03.03 CFM.5	Pengelolaan Kekayaan Budaya
					MGT-03.03 CFM.6	Pengembangan Nilai Budaya
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
MGT-03.03 CFM.7	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi					
MGT-03.03 CFM.8	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah					

				MGT-03.03 CFM.9	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
				MGT-03.03 CFM.10	Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
				MGT-03.03 CFM.11	Pembinaan Lingkungan Sosial
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				MGT-03.03 CFM.14	Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh
				Dinas Perhubungan	
				MGT-03.03 CFM.15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Daerah Tujuan Wisata
				Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
				MGT-03.03 CFM.16	Pengembangan Agrowisata
				Dinas Peternakan dan Perikanan	
				MGT-03.03 CFM.17	Pengembangan Agrowisata Perikanan
				MGT-03.03 CFM.18	Pengembangan Agrowisata Peternakan
			MGT-03.04	Meningkatnya Kegiatan Sektor Perdagangan - Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				MGT-03.04 CFM.1	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
				MGT-03.04 CFM.2	Peningkatan Pasar Daerah
				MGT-03.04 CFM.3	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
				MGT-03.04 CFM.4	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
			MGT-03.05	Peningkatan Kinerja Sektor Pertanian - Nilai PDRB Sektor Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				MGT-03.05 CFM.1	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
				MGT-03.05 CFM.2	Peningkatan Kesejahteraan Petani
				MGT-03.05 CFM.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

					MGT-03.05 CFM.4	Peningkatan Produksi/Produktivitas dan Mutu Tanaman Pertanian/Perkebunan
					MGT-03.05 CFM.5	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
					Dinas Peternakan dan Perikanan	
					MGT-03.05 CFM.6	Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
					MGT-03.05 CFM.7	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
					MGT-03.05 CFM.8	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
					MGT-03.05 CFM.9	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
					MGT-03.05 CFM.10	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
					MGT-03.05 CFM.11	Peningkatan Kesehatan Pangan Hewani
					MGT-03.05 CFM.12	Pengembangan Budidaya Perikanan
					MGT-03.05 CFM.13	Pengembangan Perikanan Tangkap
					MGT-03.05 CFM.14	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
					MGT-03.05 CFM.15	Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian
4.	MGT-04	Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa - Indeks Desa Membangun (IDM)	MGT-04.01	Peningkatan Kemandirian Desa - Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri - Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
					MGT-04.01 CFM.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa
					MGT-04.01 CFM.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa
					MGT-04.01 CFM.3	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
					MGT-04.01 CFM.4	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
					MGT-04.01 CFM.5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
					MGT-04.01 CFM.6	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Misi 3: Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan						
5.	MGT-05	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	MGT-05.01	Peningkatan Kualitas Air, Udara dan Lahan - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	
					MGT-05.01 CFM.1	Pengendalian Pencemaran, Polusi dan Perusakan Lingkungan Hidup
					MGT-05.01 CFM.2	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
					MGT-05.01 CFM.3	Peningkatan Tata Lingkungan
					MGT-05.01 CFM.4	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
					MGT-05.01 CFM.5	Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
					MGT-05.01 CFM.6	Pembinaan Lingkungan Sosial bidang Lingkungan Hidup
					MGT-05.01 CFM.7	Penataan Hukum Lingkungan Hidup
					Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					MGT-05.01 CFM.8	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum
			MGT-05.02	Peningkatan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana - % Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					MGT-05.02 CFM.1	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
					MGT-05.02 CFM.2	Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
					MGT-05.02 CFM.3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Misi 4: Memantapkan Kecukupan Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana dan Fasilitas bagi Kegiatan Pelayanan Masyarakat						
6.	MGT-06	Mewujudkan Infrastruktur Pelayanan Wilayah yang Mantap - Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	MGT-06.01	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan yang Merata untuk Semua Wilayah - Indeks Konektivitas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					MGT-06.01 CFM.1	Peningkatan Jalan dan Jembatan
					MGT-06.01 CFM.2	Pembangunan Jalan dan Jembatan
					MGT-06.01 CFM.3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
					MGT-06.01 CFM.4	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
					MGT-06.01 CFM.5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
					MGT-06.01 CFM.6	Peningkatan Penerangan Jalan Umum
					Dinas Perhubungan	
					MGT-06.01 CFM.7	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
					MGT-06.01 CFM.8	Peningkatan Pelayanan Angkutan
					MGT-06.01 CFM.9	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
			MGT-06.01 CFM.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		
			MGT-06.01 CFM.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas LLAJ		
			MGT-06.02	Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					MGT-06.02 CFM.1	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
					MGT-06.02 CFM.2	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
					MGT-06.02 CFM.3	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Misi 5: Mengembangkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Manajemen Pemerintahan yang Bersih Profesional dan Adil						
7	MGT-07	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik - Indeks Reformasi Birokrasi	MGT-07.01	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik - Opini BPK - Hasil Evaluasi AKIP - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					MGT-07.01 CFM.1	Pengembangan Data dan Informasi
					MGT-07.01 CFM.2	Perencanaan Pembangunan Ekonomi
					Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
					MGT-07.01 CFM.3	Perencanaan Penyusunan dan Monitoring Anggaran Daerah
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
					MGT-07.01 CFM.4	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi
					MGT-07.01 CFM.5	Peningkatan Tata Kelola Komunikasi dan Informatika
					MGT-07.01 CFM.6	Pengembangan Informasi Desa
					MGT-07.01 CFM.7	Pengelolaan Aplikasi Informatika
					Badan Kepegawaian Daerah	
					MGT-07.01 CFM.8	Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur
					MGT-07.01 CFM.9	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
					MGT-07.01 CFM.10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Inspektorat						
MGT-07.01 CFM.11	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan					
MGT-07.01 CFM.12	Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah					
MGT-07.01 CFM.13	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH					
MGT-07.01 CFM.14	Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah					

					Sekretariat Daerah
					MGT-07.01 CFM.15 Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah
					MGT-07.01 CFM.16 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
					MGT-07.01 CFM.17 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					MGT-07.01 CFM.18 Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil
					MGT-07.01 CFM.19 Pelayanan Dokumen Kependudukan
					MGT-07.01 CFM.20 Penataan Administrasi Kependudukan
					MGT-07.01 CFM.21 Pemanfaatan Data dan Inovasi Kependudukan
					Semua Perangkat Daerah
					MGT-07.01 CFM.22 Pelaksanaan Pelayanan Publik

C. PENJABARAN PETA PROSES BISNIS MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

No	Kode Proses	Proses Utama/Pendukung	Kode Sub Proses	Nama Sub Proses	Kode Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi
1	2	3	4	5	6	7
8	MGT-08	Perencanaan	MGT-08.01	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					MGT-08.01 CFM.1	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
					MGT-08.01 CFM.2	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
					MGT-08.01 CFM.3	Perencanaan Pembangunan Daerah
					MGT-08.01 CFM.4	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
					MGT-08.01 CFM.5	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

					MGT-08.01 CFM.6	Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	
					MGT-08.01 CFM.7	Pengembangan Data/Informasi	
				Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
					MGT-08.01 CFM.8	Perencanaan Tata Ruang	
				Perencanaan	Semua Perangkat Daerah		
					MGT-08.01 CFM.9	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	
9.	MGT-09	Pengelolaan SDM Aparatur	MGT-09.01	Pengembangan SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah		
					MGT-09.01 CFM.1	Pelayanan Kepangkatan SDM Aparatur	
					MGT-09.01 CFM.2	Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur	
					MGT-09.01 CFM.3	Pelayanan Purna Tugas ASN	
					MGT-09.01 CFM.4	Pendidikan Kedinasan SDM Aparatur	
					MGT-09.01 CFM.5	Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur	
					MGT-09.01 CFM.6	Perencanaan, Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian	
					MGT-09.01 CFM.7	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
					Pedoman Pembinaan	Sekretariat Daerah	
						MGT-09.01 CFM.8	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				Pembinaan SDM Aparatur	Semua Perangkat Daerah		
					MGT-09.01 CFM.9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
					MGT-09.01 CFM.10	Peningkatan Disiplin Aparatur	
10.	MGT-10	Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian	MGT-10.01	Penguatan Sistem Pengawasan	Inspektorat		
					MGT-10.01 CFM.1	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	

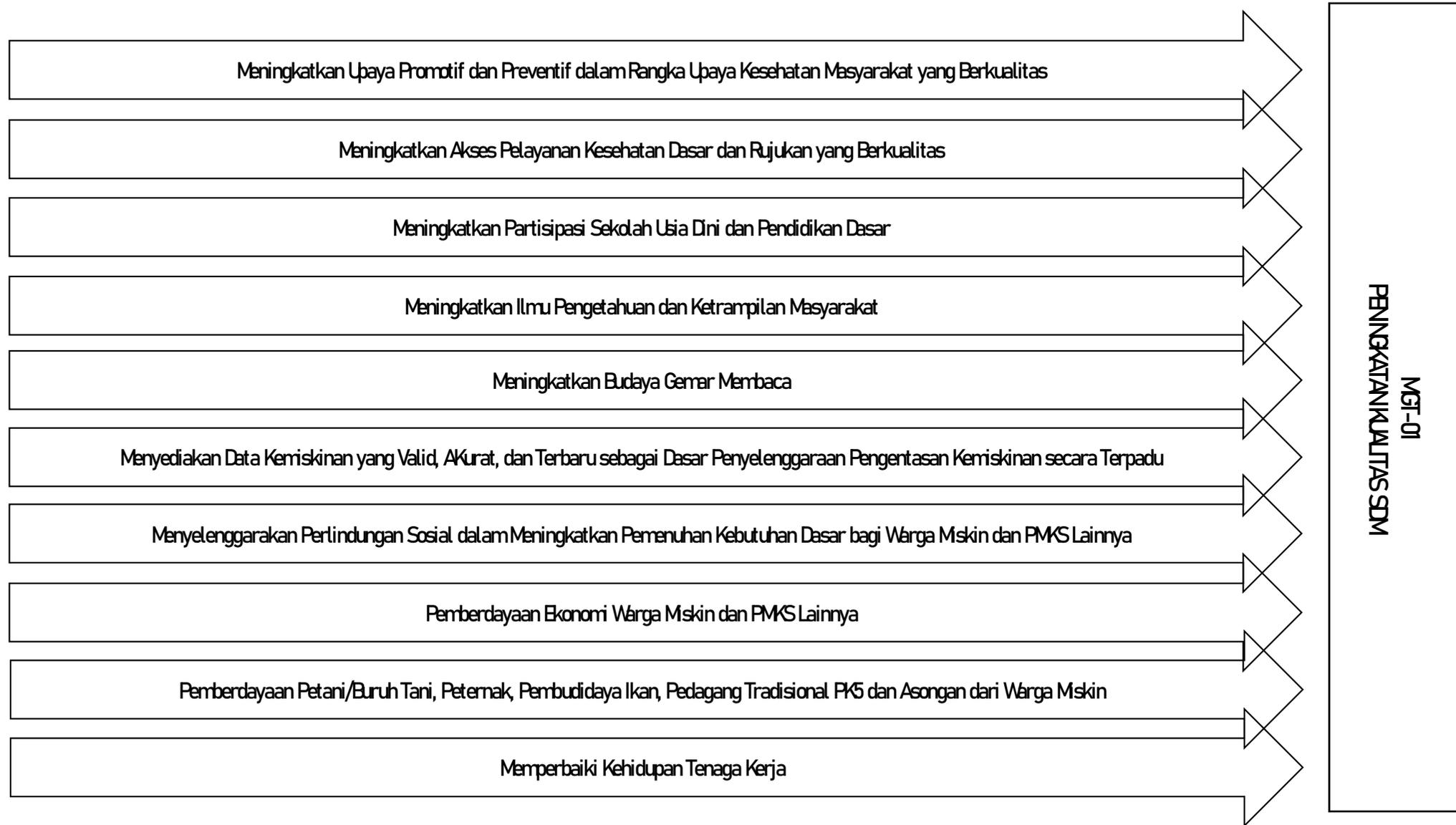
					MGT-10.01 CFM.2	Peningkatan Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
					MGT-10.01 CFM.3	Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Pemerintah Daerah
					MGT-10.01 CFM.4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
					MGT-10.01 CFM.5	Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah
				Pengendalian Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					MGT-10.01 CFM.6	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pengendalian Laporan	Semua Perangkat Daerah	
					MGT-10.01 CFM.7	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
11.	MGT-11	Tata Kelola Organisasi Pemerintahan	MGT-11.01	Pengelolaan Organisasi	Sekretariat Daerah	
					MGT-11.01 CFM.1	Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah
					MGT-11.01 CFM.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
					MGT-11.01 CFM.3	Kualitas Pelayanan Publik
					MGT-11.01 CFM.4	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
					MGT-11.01 CFM.5	Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan Kecamatan
					Kecamatan	
					MGT-11.01 CFM.6	Peningkatan Kelembagaan Kecamatan
12.	MGT-12	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	MGT-12.01	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
					MGT-12.01 CFM.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
					MGT-12.01 CFM.2	Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

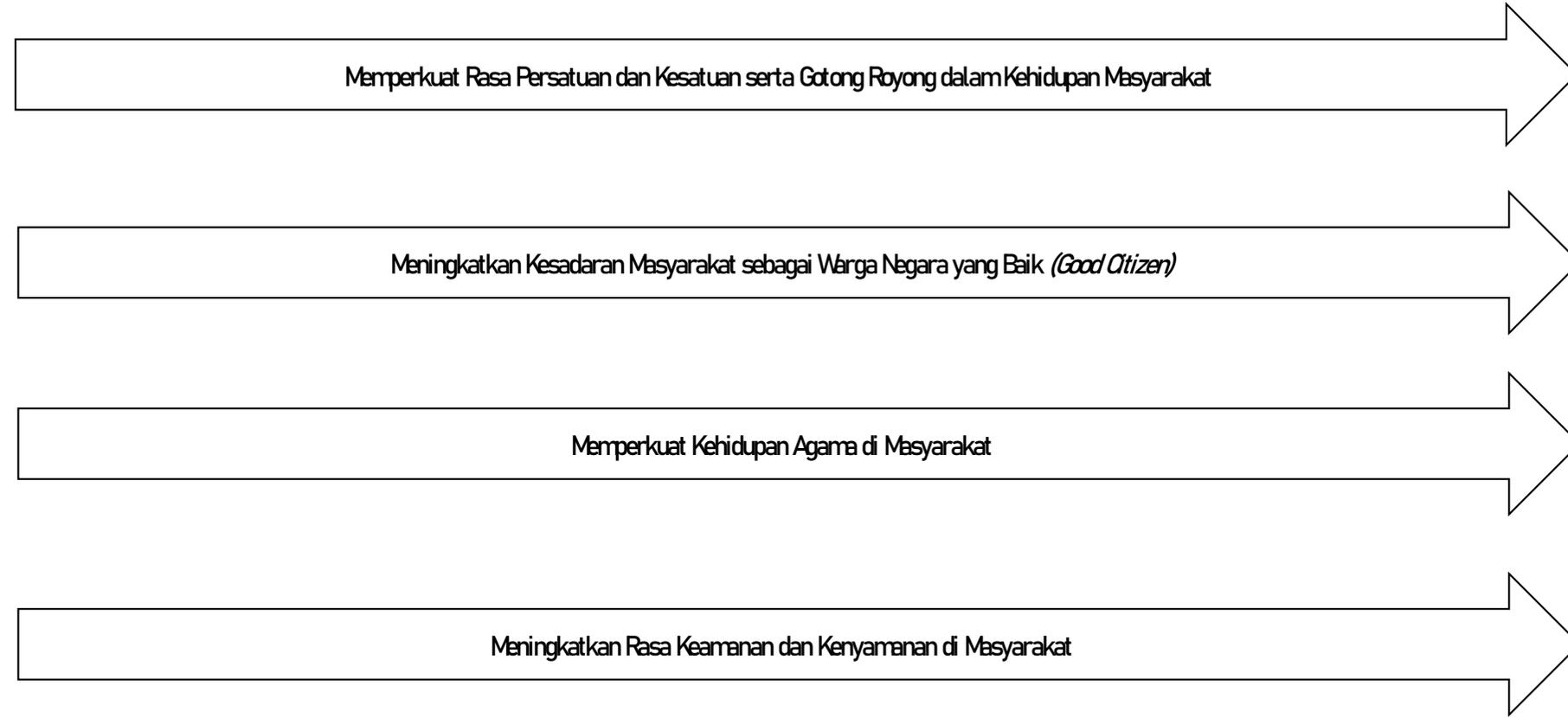
13.	MGT-13	Sistem Pengelolaan Keuangan	MGT-13.01	Penatausahaan Keuangan	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
					MGT-13.01 CFM.1	Peningkatan Pendapatan Daerah
					MGT-13.01 CFM.2	Pengelolaan Pendapatan Daerah
					MGT-13.01 CFM.3	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
					MGT-13.01 CFM.4	Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Aset Daerah
					MGT-13.01 CFM.5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
					MGT-13.01 CFM.6	Perencanaan, Penyusunan dan Monitoring Anggaran Daerah
					MGT-13.01 CFM.7	Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
				Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Semua Perangkat Daerah	
					MGT-13.01 CFM.8	Peningkatan Perencanaan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
MGT-13.01 CFM.9	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
14.	MGT-14	Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Kearsipan	MGT-14.01	Pengelolaan Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
					MGT-14.01 CFM.1	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
					MGT-14.01 CFM.2	Pengembangan Kearsipan
				Administrasi Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					MGT-14.01 CFM.3	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil
					MGT-14.01 CFM.4	Pelayanan Dokumen Kependudukan
					MGT-14.01 CFM.5	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
					MGT-14.01 CFM.6	Penataan Administrasi Kependudukan

					MGT-14.01 CFM.7	Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan
				Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	
					MGT-14.01 CFM.8	Pengembangan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Seluruh Perangkat Daerah	
					MGT-14.01 CFM.9	Pelayanan Administrasi Perkantoran
15.	MGT-15	Sistem dan Aplikasi Informasi, Statistik, dan Komunikasi.	MGT-15.01	Pemanfaatan Data dan Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
					MGT-15.01 CFM.1	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informatika
					MGT-15.01 CFM.2	Peningkatan Tata Kelola Komunikasi dan Informatika
					MGT-15.01 CFM.3	Pengembangan Sistem Informasi Desa
					MGT-15.01 CFM.4	Pengelolaan Aplikasi Informatika
					MGT-15.01 CFM.5	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
					MGT-15.01 CFM.6	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
					MGT-15.01 CFM.7	Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Bidang Komunikasi dan Informasi
					MGT-15.01 CFM.8	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
				Persandian	MGT-15.01 CFM.9	Pengembangan Persandian
					MGT-15.01 CFM.10	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
				Pelayanan Kehumasan	Sekretariat Daerah	
					MGT-15.01 CFM.11	Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Pimpinan Daerah
				Publikasi	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	

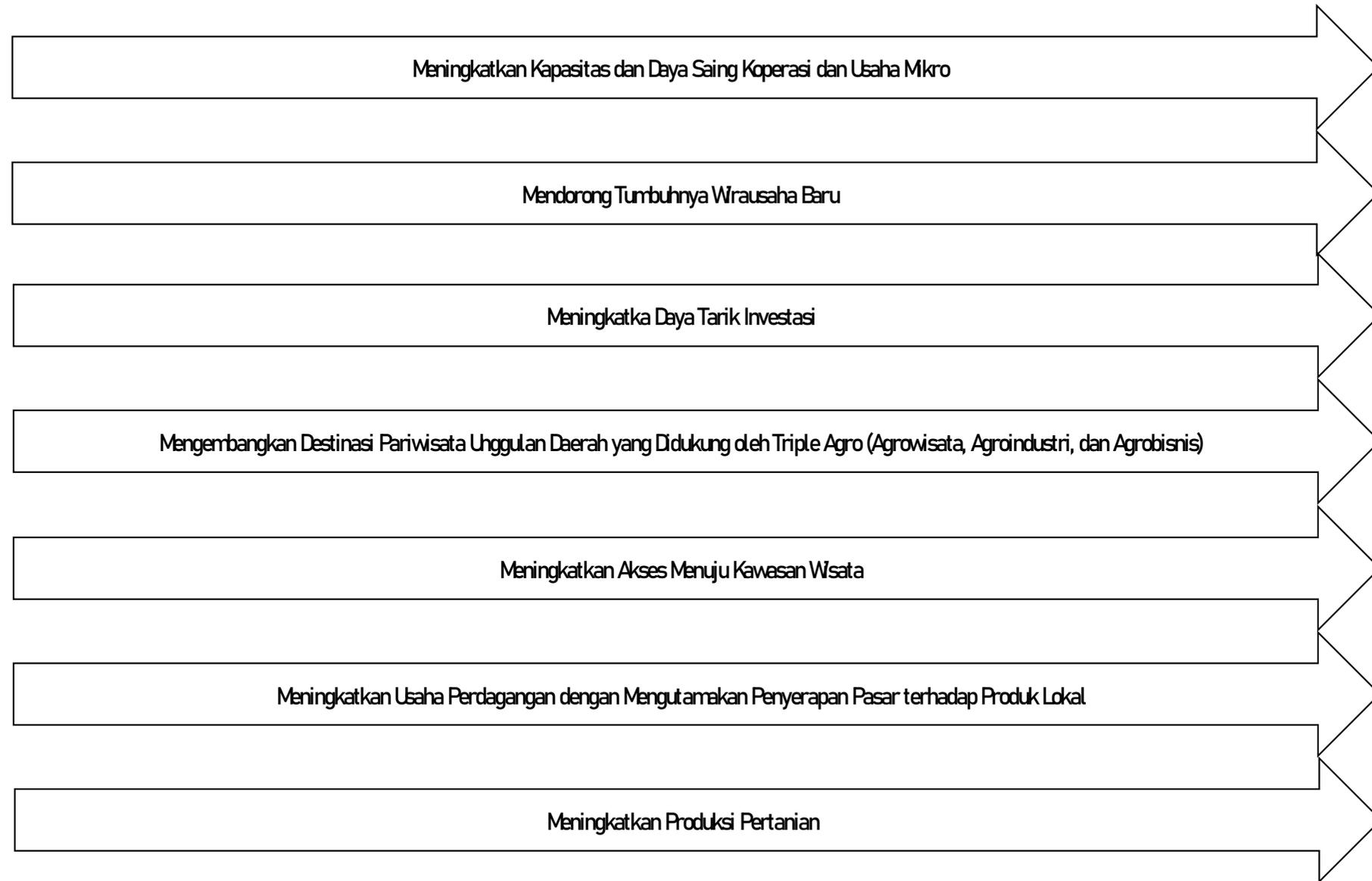
					MGT-15.01 CFM.12	Kerjasama Media Massa
					MGT-15.01 CFM.13	Pelayanan Perundang-Undangan dan Kehumasan DPRD
16.	MGT-16	Pembentukan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	MGT-16.01	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah	
					MGT-16.01 CFM.1	Penataan Peraturan Perundang-Undangan
					MGT-16.01 CFM.2	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
					MGT-16.01 CFM.3	Hak Asasi Manusia
				Humas dan Publikasi	Sekretariat DPRD	
					MGT-16.01 CFM.4	Pelayanan Perundang-Undangan dan Kehumasan DPRD

C. STRATEGI PENCAPAIAN





MGT-02
PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL



Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Lembaga Desa

Meningkatkan Kualitas SDM dan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa

Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman serta Sarana dan Prasarana Wilayah Desa

MGT-04
PENGUATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DESA

Melakukan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara

Meningkatkan Kualitas dan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Menegakkan Peraturan Daerah terkait Tata Ruang

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kawasan Rawan Bencana dan Pasca Bencana

Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

MGT-05
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

MGT-06
MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN
INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK

Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jalan dan Jembatan beserta Kelengkapannya

Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jaringan irigasi



MGT-07
PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

